PEMERINTAH PROVINSI RIAU

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2021

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PEKANBARU, AGUSTUS 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah *Subhaanahu wa Ta'aala*, hanya kepada-NYA kita mengabdi dan berserah diri karena telah diberikan kelapangan dan kesehatan sehingga dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021.

Pembangunan dan pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun sebelumnya akan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan capaian dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah yang berkompeten dalam pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada Tahun 2021 bermaksud untuk memastikan kondisi kualitas lingkungan hidup dan kehutanan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian daerah.

Selanjutnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
Daftar Tabel	.....	iii
BAB I .	**PENDAHULUAN**.....	**I.1**
	1.1. LATAR BELAKANG	I.1
	1.2. DASAR HUKUM	I.4
	1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	I.8
	1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	I.9
BAB II.	**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**	**II.1**
	2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	II.1
	2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II.29
	2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	II.31
	2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	II.36
	2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	II.57
BAB III.	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	**III.1**
	3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	III.1
	3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	III.2
	3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	III.4
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**IV.1**
BAB V	**PENUTUP**	**V.1**

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2020 Provinsi Riau	II.11
Tabel 2.2.	Target Capaian Pelaksanaan Rencana Strategis 2019-2024	II.28
Tabel T-C.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	II.30
Tabel T-C.31	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Riau ...	II.38
Tabel T-C.32	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Riau	II.58
Tabel T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021	III.7
Tabel T-C.34	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	IV.1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk regulasi dan kerangka anggaran. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rancangan Renja PD dibahas dalam forum PD yang diselenggarakan bersama antara pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) "Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaanya itu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan".

Dalam rangka memantapkan arah pembangunan daerah hendaknya selaras dengan arah pembangunan nasional. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan nasional memiliki *link and match* dengan pembangunan daerah. Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2021 disamping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 juga mengacu pada visi Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005 - 2025 dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019 - 2024, serta mengacu pada tema RKPD Tahun 2021 yakni "*Memantapkan pengembangan industri, pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi*".

Selanjutnya langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024, menjelaskan keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dengan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024 pada Pasal 4 yaitu Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 menjadi arah penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Renja PD merupakan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja PD mempunyai kedudukan

yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 merupakan rencana pembangunan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019 - 2024 yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2021 dan sesuai Peraturan Gubernur Riau nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Demi menjaga kesinambungan dan menjalankan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan selanjutnya perlu disusunnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2021 dengan mengacu kepada Rencana Startegis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu perencanaan kinerja tahunan untuk tercapainya tujuan pelayanan publik bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau maka Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2021 dimaksudkan untuk mengefektifkan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dicapai.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi

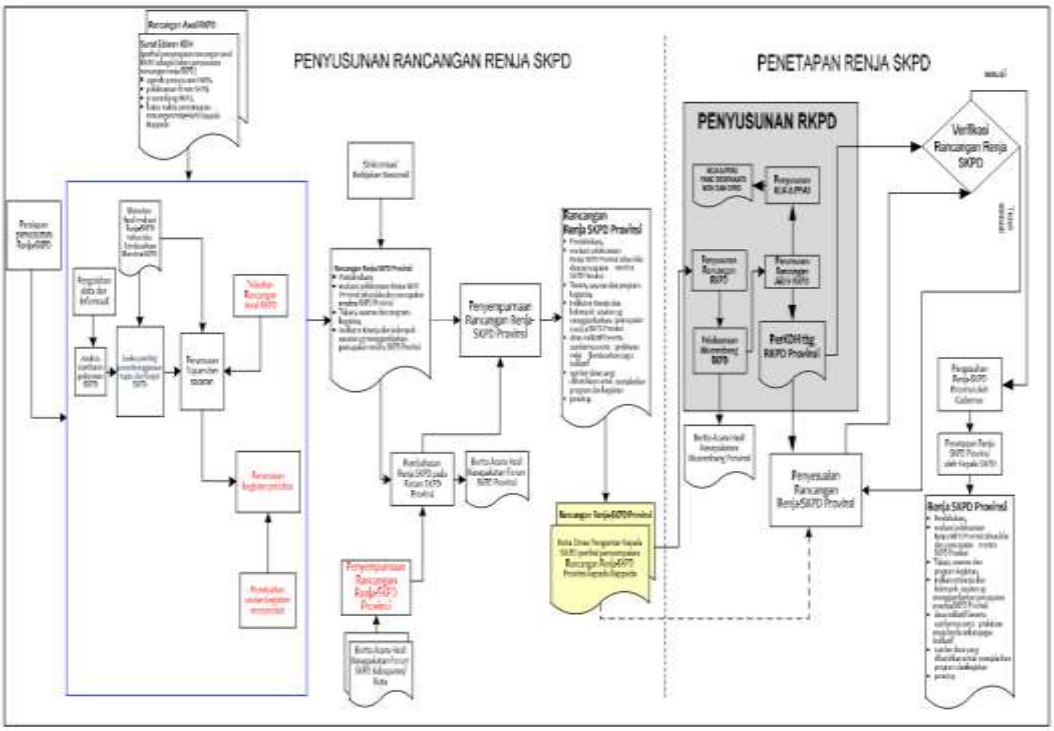

1.2. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11);
27. Peraturan Gubernur Riau nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 77);
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 52);
29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 80);
30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan penyusunan Renja PD adalah untuk mengoptimalisasi proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik pada tahun 2021.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Renja PD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2020 adalah;

- Sebagai acuan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran pada tahun 2021 bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dalam melaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, dan
7. Lampiran T-C.29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
2. Lampiran T-C. 30

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan cantatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan
4. Lampiran Tabel T-C.31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
3. Lampiran Tabel T-C.32.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
   a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
   b. Pencapaian SDGs,
   c. Pengentasan kemiskinan,
   d. Pencapaian NSPK dan SPM
   e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   f. Pengembangan daerah terisolir,
   g. Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
   c. Total kebutuhan dana pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
4. Lampiran Tabel T-C.33.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V. PENUTUP

Berisikan uraian pentup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kegiatan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2019 dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Jenis program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Perangkat Daerah terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, yang meliputi 3 urusan pemerintahan, yang terdiri atas 1 (satu) urusan wajib yaitu Urusan Wajib Lingkungan Hidup dan urusan pilihan yaitu Urusan Pilihan Kehutanan.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2019

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh SKPD selama tahun 2019.

Pencapain kinerja tahun 2019 terdiri atas sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.

Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 sebagai upaya mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019.

Pagu Total DPA SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 164.577.697.363,- Terdiri dari : Belanja Tidak Langsung (BTL) : Rp. 128.624.799.867.- dan Belanja Langsung (BL) : Rp. 35.952.897.496,-

Secara keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 150.317.412.546,- (91,34%) dari pagu total Terdiri dari : Belanja Tidak Langsung (BTL) : Rp.127.485.555.149,- (99,11%) dan Belanja Langsung : Rp22.831.857.397,- (63,50%).

Adapun dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 ada beberapa kegiatan yang tingkat realisasi target kinerjanya sebesar dibawah 50% adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.1 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Air (DAK) dengan anggaran Rp. 558.515.600,00 tidak dilaksanakan karena sudah dilakukan pelelangan umum namun tidak ada pihak yang menawar sampai dengan tanggal batas waktu yang ditetapkan.

1.2 Kegiatan Penyusunan Master Plan UPT Laboratorium Lingkungan dengan Anggaran Rp. 199.283.130,00 dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 43.260.350,00 (21,71%) dengan realisasi fisiknya adalah 27,34% dikarenakan Surat Gubernur Riau Nomor

031/BPKAD/2805 tentang Persetujuan Lahan Untuk Gedung UPT Laboratorium

Lingkungan terbit tgl 24 Oktober 2019 dan diterima oleh UPT Laboratorium Lingkungan awal November 2019 sehingga pelaksanaan kegiatan ini yang dimulai dengan pelelangan lebih kurang 2 bulan dan pelaksanaan 2 bulan maka waktunya tidak mencukupi dan kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

2. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

2.1. Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi UPT KPH Rokan (DAK) tidak dapat diteruskan karena ada kendala teknis di lapangan yaitu adanya konflik dengan masyarakat pada areal yang akan dilaksanakan kegiatan RHL sehingga jika dipaksakan akan beresiko gagal.

2.2. Kegiatan Pembuatan Tanaman Reboisasi di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar (DAK) tidak dapat diteruskan karena ada kendala teknis di lapangan yaitu adanya konflik dengan masyarakat pada areal yang akan dilaksanakan kegiatan RHL sehingga jika dipaksakan akan beresiko gagal.

3. Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan

3.1. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Kehutanan dengan anggaran Rp. 4.445.159.100,00 dan realisasi keuangannya sebesar Rp.64.842.000,00 (1,46) dengan realisasi fisiknya adalah 1,63% Karena tidak adanya permohonan dari Kabupaten/Kota maka kegiatan TORA tidak bisa dilaksanakan.

3.2. Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut UPT KPH Rokan (DAK) tidak dilaksanakan karena penyedia yang akan ditunjuk untuk mengadakan mesin gula semut pada UPT KPH Rokan adalah sama dengan penyedia pengadaan sarana produksi gula semut yang ada di KPH Tebing Tinggi. Sesuai dengan perjanjian kontrak dinyatakan batal karena penyedia tidak dapat memenuhi pengadaan mesin gula semut yang telah disepakati.

3.3. Kegiatan Pengadaan Sarana Produksi Gula Semut UPT KPH Tebing Tinggi (DAK) tidak dilaksanakan karena Kegiatan ini sampai batas waktu penyampaian persyaratan penyaluran pencairan tanggal 22 Juli 2019 pihak ketiga CV. LANGKISAU BARANGIN tidak dapat memenuhi pengadaan sarana produksi gula semut berdasarkan paket pekerjaan sarana produksi gula semut telah disepakati antara KPA dan Penyedia

Adapun dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 ada beberapa kegiatan yang tingkat realisasi target kinerjanya sebesar 100% adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.1. Kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura dengan anggaran Rp.105.576.000,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.99.463.700,00 (94,21%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

1.2. Kegiatan Koordinasi pengendalian pencemaran limbah padat dan domestik Provinsi Riau dengan anggaran Rp.65.973.700,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.65.083.100,00 (98,65%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

1.3. Kegiatan Pekan Lingkungan Indonesia dan Riau Expo dengan anggaran Rp.197.894.800,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.193.959.400,00 (98,01%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

1.4. Kegiatan Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp. 265.204.785,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.261.904.546,00 (98,76%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

1.5. Kegiatan Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau dengan anggaran Rp. 142.795.680,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.132.240.100,00 (92,61%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

1.6. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau dengan anggaran Rp. 95.881.300,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.87.186.900,00 (90,93%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

2. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

2.1. Kegiatan Pengembangan Kearifan lokal dengan anggaran Rp. 73.607.600,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.71.121.200,00 (96,62 %) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

2.2. Kegiatan Pengembangan Taman KEHATI dengan anggaran Rp. 70.622.950,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.66.458.200,00 (94,10%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

3. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

3.1. Kegiatan pengembangan pendidikan lingkungan hidup dengan anggaran Rp. 110.017.800,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.98.987.800,00 (89,97%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

3.2. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Persampahan dengan anggaran Rp. 280.340.300,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.271.266.600,00 (96,76%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

4. Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan

4.1. Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Provinsi Riau dengan anggaran Rp.358.521.500,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.332.646.400,00 (92,78%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

4.2. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-DR dengan anggaran Rp. 289.168.200,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.281.287.400,00 (97,27%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

5. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan

5.1. Kegiatan Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan KPHP Model Minas Tahura dengan anggaran Rp. 257.132.750,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.240.696.206,00 (93,61%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

5.2. Kegiatan Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam Provinsi Riau dengan anggaran Rp. 141.136.000,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.126.577.900,00 (88,43%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

5.3. Kegiatan Pengawasan, Pengamanan dan Perlindungan UPT. KPH Kampar Kiri dengan anggaran Rp. 170.714.750,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.162.659.510,00 (95,28%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

5.4. Kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan anggaran Rp. 557.747.200,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.492.569.700,00 (88,31%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

5.5. Kegiatan Pendampingan Masyarakat Peduli Api dengan anggaran Rp.229.416.000,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.210.179.400,00 (91,61%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

5.6. Kegiatan Kampanye Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan anggaran Rp.454.623.700,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.416.212.300,00 (91,55%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

5.7. Kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT. KPH Tebing Tinggi dengan anggaran Rp.257.726.700,00 dan realiasi keuangannya sebesar

Rp.237.189.600,00 (92,03%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

5.8. Kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di UPT. KPH Suligi Batu Gajah dengan anggaran Rp.356.634.100,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.347.532.720,00 (97,45%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

5.9. Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan dengan anggaran Rp.589.727.770,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp.451.772.250,00 (76,61%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

6. Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan

6.1. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan Hutan (KPHP/KPHL) dengan anggaran Rp. 121.752.510,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 107.336.202,00 (88,16%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

6.2. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. KPH Kampar Kiri dengan anggaran Rp. 100.000.000,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 96.604.200,00 (96,60%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

6.3. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. KPH Mandah dengan anggaran Rp. 50.025.000,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 48.620.500,00 (97,19%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

6.4. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan dengan anggaran Rp. 81.293.700,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 78.754.190,00 (96,88%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

6.5. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT KPH Bagan siapi api (DAK) dengan anggaran Rp. 39.740.189,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 31.669.025,00 (79,69%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

6.6. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT KPH Bengkalis Pulau (DAK) dengan anggaran Rp. 39.740.189,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 31.669.025,00 (79,69%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

6.7. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT KPH Mandau (DAK) dengan anggaran Rp. 39.740.189,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 31.669.025,00 (79,69%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

6.8. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT KPH Rokan (DAK) dengan anggaran Rp. 39.690.183,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 35.805.000,00 (90,21%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

6.9. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT KPH Suligi Batu Gajah (DAK) dengan anggaran Rp. 39.740.189,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 31.669.025,00 (79,69%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

6.10. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT KPH Sorek (DAK) dengan anggaran Rp. 39.740.189,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 31.669.025,00 (79,69%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

6.11. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT KPH Mandah (DAK) dengan anggaran Rp. 39.740.189,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 31.669.025,00 (79,69%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

6.12. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk Pengamanan KPH/TAHURA UPT KPH Indragiri (DAK) dengan anggaran Rp. 39.740.189,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 35.805.000,00 (90,10%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

7. Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan

7.1. Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Hutan Rakyat dengan anggaran Rp. 383.426.800,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 365.433.190,00 (95,31%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

7.2. Kegiatan Pengembangan Budidaya Lebah Madu pada 1 KTH (DAK) dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 49.348.500,00 (98,70%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

7.3. Kegiatan Pengembangan Budidaya Lebah Madu UPT. KPH Tasik Besar Serkap (DAK) dengan anggaran Rp. 50.000.000,00 dan realiasi keuangannya sebesar Rp. 48.875.000,00 (97,75%) dengan realisasi fisiknya adalah 100%.

Faktor-faktor kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran penyebab tidak tercapainya target kinerja, yaitu :

1) Urusan Lingkungan Hidup
   - Ada beberapa kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan karena pertimbangan keterbatasan waktu pada pelaksanaan kegiatan.
   - Adanya beberapa paket pekerjaan yang tidak jadi dilaksanakan karena pertimbangan ketersediaan Dana.
2) Urusan Kehutanan
   - Terbatasnya waktu penganggaran akan mempengaruhi pada pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan penyerapan Anggaran Minim;
   - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam partisipasi pada kegiatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang merupakan Program Prioritas Nasional.
   - Masih kurangnya pencemaran pada batas waktu penyampaian persyaratan pengadaan barang, yang menimbulkan tidak dilaksankannya paket pekerjaan.

Upaya mengatasi faktor-faktor kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran penyebab tidak tercapainya target kinerja, yaitu :

1) Urusan Lingkungan Hidup
   - Melakukan percepatan dan pencermatan dimulainya suatu kegiatan.
   - Melakukan penajaman skala prioritas untuk perencanaan program kegiatan tahun selanjutnya.
2) Urusan Kehutanan
   - Mengoptimalkan penajaman perencanaan pada batas waktu penganggaran dan pelaksanaan kegiatan;
   - Peningkatan Sosialisasi Pembinaan Masyarakat dalam partisipasi pada kegiatan Tanah Reforma Agraria (TORA);
   - Pencermatan pada Pengadaan Barang dan Jasa atau Paket pekerjaan sebelum dilakukannya Pelelangan.

Berdasarkan realisasi anggaran belanja langsung tahun 2020 sampai pada kondisi triwulan II adalah sebesar Rp. 7.212.027.647,- sedangkan capaian realisasi fisik perkegiatan dapat dilihat pada tabel TC.29 dibawah ini.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020
Provinsi Riau

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

Kode					Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra pada Tahun 2019 s/d 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					BELANJA LANGSUNG									
					Non Urusan									
					NON URUSAN									
0.	0.	00.	01.		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran								

0.	0.	00.	01.	001	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	16000	0	0	0	0	1000	17	1,70
0.	0.	00.	01.	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	130	0	0	0	0	26	26	100,00
0.	0.	00.	01.	003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	250	0	0	0	0	44	32	72,73
0.	0.	00.	01.	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	72	0	0	0	0	12	6	50,00
0.	0.	00.	01.	007	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	225	0	0	0	0	45	45	100,00
0.	0.	00.	01.	008	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	90	0	0	0	0	18	18	100,00

0.	0.	00.	01.	009	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	72	0	0	0	0	12	5	41,67
0.	0.	00.	01.	010	Penyediaaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	56650	0	0	0	0	10000	3649	36,49
0.	0.	00.	01.	011	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	560	0	0	0	0	100	52	52,00
0.	0.	00.	01.	012	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	250	0	0	0	0	50	36	72,00
0.	0.	00.	01.	013	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	85	0	0	0	0	17	17	100,00
0.	0.	00.	01.	037	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	500	0	0	0	0	100	0	0,00

0.	0.	00.	02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur								
0.	0.	00.	02.	013	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	132	0	0	0	0	22	9	40,91
0.	0.	00.	02.	014	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	70	0	0	0	0	12	5	41,67
0.	0.	00.	02.	016	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2353	0	0	0	0	400	5	1,25
					URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR									
					LINGKUNGAN HIDUP									
1.	2.	05.	15.		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status Tingkat Pencemaran Udara; Status Tingkat Pencemaran Air;								

1.	2.	05.	15.	001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Kab/Kota yang meningkat kebersihan dan keteduhannya	72	0	0	0	0	12	0	0,00
1.	2.	05.	15.	002	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Dokumen Pemantauan Kualitas Lingkungan	59	0	0	0	0	4	0	0,00
1.	2.	05.	15.	003	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Jumlah Segmen	5	0	0	0	0	1	0	0,00
1.	2.	05.	15.	004	Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang terhimpun data pengurangan danpenanganan sampah terkait Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi Riau	60	0	0	0	0	12	2	16,67
1.	2.	05.	15.	005	Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	Frekuensi Event Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	10	0	0	0	0	2	0	0,00

1.	2.	05.	15.	006	Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup yang diverifikasi	340	0	0	0	0	60	25	41,67
1.	2.	05.	15.	007	Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	Jumlah lokasi meningkatnya kinerja KPA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan terlaksananya penataan usaha/kegiatan di kabupaten kota	57	0	0	0	0	12	1	8,33
1.	2.	05.	15.	008	Pengawasan Izin Lingkungan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi izin lingkungannya	300	0	0	0	0	50	3	6,00
1.	2.	05.	15.	009	Asistensi KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota Asistensi dan Validasi KLHS KRP Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	72	0	0	0	0	12	5	41,67
1.	2.	05.	15.	010	Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Kab/Kota yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3	60	0	0	0	0	12	2	16,67

1.	2.	05.	15.	011	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen	20	0	0	0	0	1	0	0,00
1.	2.	05.	15.	012	Penyusunan DED dan Izin Lingkungan Laboratorium Lingkungan UPT. Laboratorium Lingkungan	Jumlah Dokumen DED dan Izin Lingkungan Laboratorium Lingkungan UPT. Laboratorium Lingkungan	5	0	0	0	0	1	0	0,00
1.	2.	05.	15.	013	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan	Jumlah unit sarana dan prasarana yang memadai di UPT Laboratorium Lingkungan	450	0	0	0	0	86	0	0,00
1.	2.	05.	15.	014	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	Jumlah Kab/Kota yang dibina tentang Pendidikan Lingkungan Hidup	60	0	0	0	0	12	2	16,67
1.	2.	05.	15.	015	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Riau	5	0	0	0	0	1	0	0,00

1.	2.	05.	15.	016	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Riau (d/h SLHD)	Jumlah Dokumen IKPLHD Provinsi Riau dan terselenggaranya penilaian Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	5	0	0	0	0	1	0	0,00
1.	2.	05.	15.	017	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Unit Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	120	0	0	0	0	24	0	0,00
1.	2.	05.	15.	018	Pengembangan Kearifan Lokal	Jumlah Kab/Kota yang dapat pembinaan kearifan lokal (penghargaan lingkungan hidup)	40	0	0	0	0	6	4	66,67
1.	2.	05.	15.	019	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah Lokasi Keanekaragaman Hayati di Areal Izin Usaha/Kegiatan	60	0	0	0	0	12	0	0,00
1.	2.	05.	15.	020	Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau	Jumlah lokasi kampung iklim di Provinsi Riau yang dibina	35	0	0	0	0	7	0	0,00
1.	2.	05.	15.	021	Identifikasi Pengembangan dan Pengelolaan Program Riau Hijau di Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	5	0	0	0	0	1	0	0,00

1.	2.	05.	15.	022	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Kawasan Bekas Tambang Rakyat	Luas rehabilitasi dan pemulihan kawasan bekas tambang rakyat	150	0	0	0	0	30	0	0,00
1.	2.	05.	15.	023	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut	Luasan yang dilakukan pemulihan Mangrove Hutan Bakau dalam upaya pengendalian kerusakan kawasan pesisir dan laut	150	0	0	0	0	30	0	0,00
1.	2.	05.	15.	027	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT, Laboratorium Lingkungan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT Laboratorium Lingkungana	60	0	0	0	0	12	6	50,00
1.	2.	05.	15.	028	Pengelolaan Data Informasi dan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Jenis Dokumen	40	0	0	0	0	8	0	0,00
1.	2.	05.	15.	029	Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	1	0	0	0	0	1	0	0,00

1.	2.	05.	15.	030	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Unit	10	0	0	0	0	2	0	0,00
					URUSAN PILIHAN									
					KEHUTANAN									
2.	0.	04.	16.		PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN	Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan								
2.	0.	04.	16.	001	Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Badan Usaha	229	0	0	0	0	35	6	17,14
2.	0.	04.	16.	002	Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Hak/Rakyat	Jumlah Unit Pemanfaatan Hutan Rakyat	180	0	0	0	0	30	0	0,00
2.	0.	04.	16.	003	Asistensi Pengendalian Pelaksanaan RKU, RKT dan RPHD pada Perizinan Perhutanan Sosial	Jumlah izin dalam tertibnya pelaksanaan PS yang berorientasi masyarakat	145	0	0	0	0	20	0	0,00

2.	0.	04.	16.	004	Penyuluhan dan Pengawasan Perlindungan Hutan pada Hutan Adat/HKm/Desa	Jumlah Lokasi Penyuluhan dan Pengawasan perlindungan hutan pada hutan adat/H km/Desa	22	0	0	0	0	3	0	0,00
2.	0.	04.	16.	005	Penyusunan desain tapak pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di wilayah UPT KPH Rokan	Jumlah dokumen penyusunan desain tapak pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di wilayah UPT KPH Rokan	3	0	0	0	0	3	0	0,00
2.	0.	04.	16.	006	Pengembangan jasa Ekowisata Sungai bersama masyarakat sekitar KPH Tasik besar serkap	Jumlah lokasi pemanfaatan ekowisata sungai di dalam dan sekitar areal KPH Tasik Besar Serkap bersama masyarakat Desa Sekitar Hutan	3	0	0	0	0	1	0	0,00
2.	0.	04.	16.	007	Pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan sarana prasarana wisata tahura SSH	Jumlah Lokasi	5	0	0	0	0	1	0	0,00
2.	0.	04.	16.	008	Inventarisasi Potensi Ekowisata dan Jasa Lingkungan di UPT KPH Suligi Batu Gajah	Jumlah lokasi potensi ekowisata dan jasa lingkungan di KPH Suligi Batu Gajah	3	0	0	0	0	1	0	0,00

2.	0.	04.	16.	009	Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau	Jumlah dokumen	39	0	0	0	0	1	0	0,00
2.	0.	04.	16.	010	Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Perambahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal	Jumlah Laporan	125	0	0	0	0	25	11	44,00
2.	0.	04.	16.	012	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas Tahura	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas tahura	60	0	0	0	0	12	6	50,00
2.	0.	04.	16.	013	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT pelatihan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT pelatihan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	60	0	0	0	0	12	6	50,00
2.	0.	04.	16.	014	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan	60	0	0	0	0	12	6	50,00

2.	0.	04.	16.	015	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	60	0	0	0	0	12	6	50,00
2.	0.	04.	16.	016	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau	60	0	0	0	0	12	6	50,00
2.	0.	04.	16.	017	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	60	0	0	0	0	12	6	50,00
2.	0.	04.	16.	018	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	60	0	0	0	0	12	6	50,00
2.	0.	04.	16.	019	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	60	0	0	0	0	12	6	50,00
2.	0.	04.	16.	020	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi	60	0	0	0	0	12	6	50,00

2.	0.	04.	16.	021	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	60	0	0	0	0	12	6	50,00
2.	0.	04.	16.	022	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	60	0	0	0	0	12	6	50,00
2.	0.	04.	16.	023	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Singingi	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada UPT KPH Singingi	60	0	0	0	0	12	6	50,00
2.	0.	04.	16.	024	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap	60	0	0	0	0	12	6	50,00
2.	0.	04.	16.	025	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api	60	0	0	0	0	12	6	50,00
2.	0.	04.	16.	026	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	60	0	0	0	0	12	6	50,00

2.	0.	04.	16.	027	Rekonsiliasi PNBP (Peningkatan Penerimaan Negara) Sektor Kehutanan	Jumlah Dokumen	5	0	0	0	0	1	0	0,00
2.	0.	04.	16.	028	Pengembangan Perbenihan	Jumlah Bibit	100000	0	0	0	0	200000	0	0,00
2.	0.	04.	16.	029	Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Kelompok Tani	10	0	0	0	0	2	0	0,00
2.	0.	04.	17.		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis								
2.	0.	04.	17.	001	Pengembangan tanaman lokal dan tanaman serba guna (MPTS) di kawasan areal masyarakat hutan adat	Jumlah lokasi pengembangan tanaman lokal dan tanaman serba guna (MPTS) di kawasan areal masyarakat hutan adat	30	0	0	0	0	6	0	0,00
2.	0.	04	17.	002	Aksi serentak menanam pohon dan penghijauan dan konservasi alam Provinsi Riau	Jumlah Lokasi Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam Provinsi Riau	5	0	0	0	0	1	0	0,00

2.	0.	04	17.	003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian	Jumlah unit sarana dan prasarana persemaian yang layak dan memadai	5	0	0	0	0	1	0	0,00
2.	0.	04	17.	004	Pengembangan Data dan informasi Daerah Aliran Sungai	Jumlah dokumen Groundcheck kondisi penutupan lahan kritis di Provinsi Riau	5	0	0	0	0	1	0	0,00
2.	0.	04	17.	005	Penanganan dan penyelesaian perkara/ kasus tindak pidana kehutanan	Jumlah perkara /kasus tindak pidana kehutanan yang terselesaikan	10	0	0	0	0	2	1	50,00
2.	0.	04	17.	006	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-DR	Jumlah Laporan	60	0	0	0	0	12	0	0,00
2.	0.	04	17.	007	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	60	0	0	0	0	11	5	45,45
2.	0.	04	17.	008	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	Jumlah Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	50	0	0	0	0	10	0	0,00

2.	0.	04	17.	009	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Lokasi	25	0	0	0	0	5	3	60,00
2.	0.	04	17.	010	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Frekuensi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	65	0	0	0	0	13	4	30,77

2.1.1 Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sementara itu, evaluasi pelaksanaan rencana kerja PD pada tahun 2020 mengacu pada Perjanjian Kinerja pada tahun 2020. Terdapat 5 program dan 100 kegiatan dengan anggaran belanja langsung Rp.50.907.873.562,- dengan target capaian realisasi fisik dan keuangan sebesar 100%.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 2020 memuat program dan kegiatan utama yang berkaitan langsung dalam upaya pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yaitu;

1. Meningkatnya Tutupan Lahan
2. Meningkatnya Kualitas Air
3. Meningkatnya Kualitas Udara
4. Menurunnya Emisi GRK Sektor Limbah
5. Menurunnya Emisi GRK Sektor Kehutanan

Tabel 2.2.
Target Capaian Pelaksanaan Rencana Strategis 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	67,62	68,00	68,35	68,70	69,08
		Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	58,30	58,60	58,80	59,00	59,20
		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	90,30	90,60	90,90	91,20	91,60
		Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	57,59	58,09	58,59	59,09	59,59
2	Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Di Provinsi Riau		Emisi gas rumah kaca (GgCO2-e)	199.421	197.426	195.452	193.498	191.563
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah	1	1	1	1	1
			Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan	1	1	1	1	1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau merupakan salah satu Perangkat Daerah yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, oleh karenanya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) Nasional.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau

No	Indikator Kinerja Program (*outcome*)/ Kegiatan (*output*)	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
				Tahun 2016 (N-2)	Tahun 2017 (N-1)	Tahun 2018 (N)	Tahun 2019 (N+1)	Tahun 2016 (N-2)	Tahun 2017 (N-1)	Tahun 2018 (N)	Tahun 2019 (N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		K		K	K	K	K	K	K	K	K	
	IKLH				58,23	60,10	61,99		63,93			
	Luas lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)				761.773	914.128	1.096.954		808,217		48,89	
	Luas hutan yang dikelola sesuai fungsinya (Ha)				3.356.896	3.356.896	3.356.896					
	Luas hutan yang terlindungi (Ha)				233.910	233.910	233.910					

Dari tabel TC. 30 dapat dijelaskan bahwa dalam Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dari tahun 2017-2019 pada Indikator Kinerja Utama (IKU) direncanakan ada kenaikan pada IKLH target yang akan dicapai, sedangkan indikator kinerja yang lainnya belum maksimal pencapiannya sesuai target yang direncanakan.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Riau dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan lingkungan hidup kabupaten, provinsi dan nasional. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan lingkungan hidup dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan lingkungan hidup dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau telah melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencapai Visi dan Misi Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD dan RPJMD. Aspek perencanaan sebagaimana diamanatkan undang-undang secara terus menerus memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah, Musrenbangda, forum konsultasi publik dan proses koordinasi antar sektor pembangunan kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau.

Untuk itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menetapkan kebijakan perencanaan sebagai berikut;

a. Pembaharuan sistem dengan meningkatkan mutu dan profesionalisme sumberdaya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, pemantapan kelembagaan dan organisasi, peningkatan sarana dan

prasarana perkantoran serta fasilitasi dukungan manajemen administrasi perkantoran;

b. Pemantapan dan perencanaan lingkungan dan system informasi lingkungan.
c. Peningkatan penelitian dan pengembangan lingkungan hidup.
d. Penguatan disentralisasi dalam pengelolaan hutan dengan pembangunan KPHP Model sebagai perpanjangan tugas dari pusat ke daerah terhadap pengelolaan hutan.
e. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pembangunan lingkungan hidup dengan pemerintah pusat;
f. Penguatan kelembagaan penyuluhan dan pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan.
g. Peningkatan peran sektor lingkungan hidup dan kehutanan di tingkat regional maupun global.
h. Komitmen dan konsistensi penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
i. Penguatan pemanfaatan SDA untuk tujuan perlindungan, pelestarian alam serta kualitas lingkungan hidup.
j. Penguatan pemanfaatan SDA untuk keseimbangan lingkungan global, dengan meningkatkan kualitas pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lingkungan hidup, dengan perbaikan manajemen usaha bidang lingkungan hidup dan peningkatan kinerja para pelaku usaha.
k. Peningkatan kualitas pengelolaan, pengolahan dan penyajian data dan pengembangan sistem informasi pembangunan lingkungan hidup.
l. Penguatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup, pengawasan dan penegakan hokum lingkungan secara terpadu.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Minimnya penganggaran yang bersumber dari APBN serta keterbatasan kemampuan pembiayaan oleh daerah (provinsi/kabupaten/kota);
2. Masih perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya aparatur dalam bidang perencanaan, teknologi informasi dan tenaga pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Masih rendahnya kesadaran, pemahaman, komitmen dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya alam.
4. Koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah masih belum optimal.
5. Belum tersedianya perencanaan pengelolaan lingkungan yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
6. Masih kurangnya fasilitas pengelolaan lingkungan termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
7. Masih kurangnya kualitas produk-produk unggulan daerah setempat dan hasil hutan bukan kayu, seperti arag bakau, lebah madu, jamur kayu, aren, gaharu, dsb.;
8. Masih belum maksimalnya koordinasi dalam hal penataan batas kawasan hutan.

Dengan berbagai permasalahan dan hambatan di atas menyebabkan masih belum maksimalnya pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mencapai visi dan misi pembangunan kualitas lingkungan hidup, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti pengurangan emisi karbon akibat deforestasi dan degradasi hutan, dan pengelolaan lahan gambut.

Dampak terhadap visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/ internasional adalah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta terjadinya kebakaran hutan dan lahan akan berakibat pada turunnya IKLH (IKA, IKU, dan IKTL) Provinsi Riau sehingga berdampak pada komitmen Nasional terhadap pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tantanagan :

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah berkurangnya kewenangan kabupaten pada urusan bidang kehutanan serta kelembagaan KPH ditingkat tapak yang baru di bentuk di akhir tahun 2017.
2. Pertambahan penduduk yang terus meningkat, baik ditingkat daerah (Kab/Kota/Provinsi), tingkat nasional dan dunia, akan memberikan tekanan secara langsung dan tidak langsung terhadap lingkungan dan kehutanan, berupa; pembukaan lahan secara masif (konversi lahan), eksploitasi sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan, dan lain sebagainya
3. Belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai acuan pengelolaan lingkungan hidup jangka panjang (30) tahun. Ketidak tersedianya RPPLH ini menjadi tantangan dalam merencanakan strategi-strategi pengelolaan dan pelindungan oleh pemerintah daerah.
4. 60% Daerah Riau merupakan lahan gambut dan belum adanya rencana pengelolaan ekosistem gambut (RPEG) secara terpadu. Riau memiliki 4,963,635 Ha Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang perlu perencanaan yang baik untuk memastikan pelestariannya.
5. Tingginya alih fungsi lahan hutan termasuk hutan rawa gambut menjadi areal pertanian, perkebunan.

6. Dukungan pendanaan tidak sebanding dengan tingkat permasalahan lingkungan dan kehutanan di Provinsi Riau.
7. Relevansi perencanaan provinsi dan kabupaten dalam pengelolaan dan perlindungan hidup belum terintegrasi.
8. Sistem penegakan hukum yang masih lemah dan perlu ditingkatkan
9. Tidak terlaksananya penyusunan rancangan RPPLH Provinsi Riau sebagai acuan pengelolaan lingkungan hidup untuk 30 tahun ke depan.
10. Regulasi (PERDA atau PERGUB) sebagai dasar hukum pengembangan laboratorium lingkungan belum ada.
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau belum memiliki bangunan laboratorium lingkungan.
12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau belum memiliki unit kerja khusus yang menangani pengembangan laboratorium lingkungan.
13. Belum adanya unit kerja khusus yang menangani pengembangan laboratorium termasuk regulasi pendukung (Perda atau Pergub) sebagai dasar pengembangan Laboratorium lingkungan hidup
14. Potensi wisata alam belum tertangani dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber PAD bagi Pemerintah Provinsi Riau.
15. Dukungan penganggaran yang masih minim.

Peluang :

1. Isu lingkungan hidup dan kehutanan menjadi isu global
2. Komitmen kebijakan pembangunan rendah Karbon (Low Carbon Development) yang terinternalisasi dalam kebijakan pembangunan ditingkat nasional
3. Provinsi Riau menjadi daerah piloting implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon, melalui MoU bersama Bappenas dan Gubenur Riau.
4. Adanya alternatif -alternatif pendanaan dibidang lingkungan hidup. Antara lain Coorporate Social Responsibility (CSR) dibidang lingkungan, Pengurangan emisi dari sektor kehutanan/ Reducing Emission from

Deforestation & Degradation (REDD), Kerjasama selatan-selatan/South-South Cooperation (SSC), Kerjasama Koridor Rimba/Rimba Corridor.

5. Regulasi penerapan instrumen ekonomi lingkungan sebagai strategi percepatan perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup,.
6. Potensi bantuan keuangan ke Daerah dari Provinsi yang berpotensi didorong untuk fokus pada isu kebijakan lingkungan hidup.
7. Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) Sebagai strategi mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.
8. Inisiatif penertiban industri ilegal dalam kawasan hutan (perkebunan, pertambangan). Komitmen kebijakan Restorasi ekosistem gambut.

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menurut skala prioritas penanganannya adalah sebagai berikut:

1. Perlu penanganan serius dalan meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan indeks kulitas air, udara dan tutupan lahan.
2. Penanganan lahan kritis secara berkelanjutan dan ditingkatkan.
3. Upaya dalam mempertahankan hutan yang dikelola sesuai fungsinya tetap terjaga secara berkelanjutan.
4. Dukungan kebijakan dan keberpihakan pemerintah dalam melindungi hutan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra DLHK dengan hasil pencapaian target tahunan. Rancangan awal Renja yang telah disusun oleh DLHK telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja DLHK Provinsi Riau.

Untuk mencapai prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berupaya menunjang dalam aspek perencanaan yang mencakup semua sektor pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Riau melalui peningkatan koordinasi antar stakeholder, pemutakhiran data, peningkatan sistem informasi, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan peningkatan sarana dan prasarana penunjang lainnya dalam hal menghasilkan perencanaan yang optimal. Selanjutnya pada tabel T-C.31 memuat rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

TABEL T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

PROVINSI RIAU

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	NON URUSAN				**7.577.199.462**	**NON URUSAN**				**7.577.199.462**	
	NON URUSAN				**7.577.199.462**	**NON URUSAN**				**7.577.199.462**	
	NON URUSAN				**7.577.199.462**	**NON URUSAN**				**7.577.199.462**	
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**	**7.121.949.462**	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**	**7.121.949.462**	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Provinsi Riau	Jumlah Surat yang Dikirim	1000 Surat	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Provinsi Riau	Jumlah Surat yang Dikirim	1000 Surat	20.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Riau	Jumlah rekening yang dibayar	26 Rekening	1.760.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi Riau	Jumlah rekening yang dibayar	26 Rekening	1.760.000.000	

3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	44 Unit	764.690.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekanbaru	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	44 Unit	764.690.000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	527.109.500	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Pekanbaru	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	527.109.500	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	45 Jenis	128.772.400	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Pekanbaru	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	45 Jenis	128.772.400	
6	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	18 Jenis	63.860.000	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Pekanbaru	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	18 Jenis	63.860.000	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Jenis	202.600.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pekanbaru	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Jenis	202.600.000	
8	Penyediaaan Makan dan Minuman	Pekanbaru	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	10000 Porsi	337.200.000	Penyediaaan Makan dan Minuman	Pekanbaru	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	10000 Porsi	337.200.000	
9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar dan Dalam Provinsi Riau	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 Kali	1.085.636.562	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar dan Dalam Provinsi Riau	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100 Kali	1.085.636.562	

10	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	50 OB	1.214.554.200	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Pekanbaru	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	50 OB	1.214.554.200	
11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	17 OB	502.350.000	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Pekanbaru	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	17 OB	502.350.000	
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100 Persen	515.176.800	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Provinsi Riau	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100 Persen	515.176.800	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**100 Persen**	**455.250.000**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**100 Persen**	**455.250.000**	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Provinsi Riau	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	22 Unit	170.800.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Provinsi Riau	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	22 Unit	170.800.000	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Unit	117.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Provinsi Riau	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Unit	117.000.000	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	400 Unit	167.450.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Provinsi Riau	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	400 Unit	167.450.000	
	URUSAN WAJIB				**8.973.502.700**	**URUSAN WAJIB**				**8.973.502.700**	

	WAJIB NON PELAYANAN DASAR				**8.973.502.700**	**WAJIB NON PELAYANAN DASAR**				**8.973.502.700**	
	LINGKUNGAN HIDUP				**8.973.502.700**	**LINGKUNGAN HIDUP**				**8.973.502.700**	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		**Status Tingkat Pencemaran Udara; Status Tingkat Pencemaran Air;**	**70-75 Poin; 55-60 Poin;**	**8.973.502.700**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Status Tingkat Pencemaran Udara; Status Tingkat Pencemaran Air;**	**70-75 Poin; 55-60 Poin;**	**8.973.502.700**	
16	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang meningkat kebersihan dan keteduhannya	12 Kab/Kota	114.854.900	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang meningkat kebersihan dan keteduhannya	12 Kab/Kota	114.854.900	
17	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pemantauan Kualitas Lingkungan	4 Dokumen Kualitas Lingkungan	1.190.740.000	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pemantauan Kualitas Lingkungan	4 Dokumen Kualitas Lingkungan	1.190.740.000	
18	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Provinsi Riau	Jumlah Segmen	1 Segmen	338.824.000	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Provinsi Riau	Jumlah Segmen	1 Segmen	338.824.000	
19	Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang terhimpun data pengurangan danpenanganan sampah terkait Kebijakan dan	12 Kab/Kota	292.699.600	Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang terhimpun data pengurangan danpenanganan sampah terkait Kebijakan dan	12 Kab/Kota	292.699.600	

			Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi Riau					Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi Riau			
20	Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	Luar dan Dalam Provinsi Riau	Frekuensi Event Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	2 Kali	303.135.500	Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	Luar dan Dalam Provinsi Riau	Frekuensi Event Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	2 Kali	303.135.500	
21	Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	Provinsi Riau	Jumlah Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup yang diverifikasi	60 Kasus	243.056.000	Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	Provinsi Riau	Jumlah Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup yang diverifikasi	60 Kasus	243.056.000	
22	Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Riau	Jumlah lokasi meningkatnya kinerja KPA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan terlaksananya penataan usaha/kegiatan di kabupaten kota	12 Lokasi	296.816.700	Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Riau	Jumlah lokasi meningkatnya kinerja KPA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan terlaksananya penataan usaha/kegiatan di kabupaten kota	12 Lokasi	296.816.700	
23	Pengawasan Izin Lingkungan	Provinsi Riau	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi izin lingkungannya	50 Usaha/Kegiatan	142.028.200	Pengawasan Izin Lingkungan	Provinsi Riau	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi izin lingkungannya	50 Usaha/Kegiatan	142.028.200	

24	Asistensi KLHS Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota Asistensi dan Validasi KLHS KRP Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	12 Kab/Kota	185.353.500	Asistensi KLHS Kabupaten/Kota	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota Asistensi dan Validasi KLHS KRP Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	12 Kab/Kota	185.353.500	
25	Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3	12 Kab/Kota	193.521.000	Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3	12 Kab/Kota	193.521.000	
26	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	91.459.300	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	91.459.300	
27	Penyusunan DED dan Izin Lingkungan Laboratorium Lingkungan UPT. Laboratorium Lingkungan	Pekanbaru	Jumlah Dokumen DED dan Izin Lingkungan Laboratorium Lingkungan UPT. Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	337.500.000	Penyusunan DED dan Izin Lingkungan Laboratorium Lingkungan UPT. Laboratorium Lingkungan	Pekanbaru	Jumlah Dokumen DED dan Izin Lingkungan Laboratorium Lingkungan UPT. Laboratorium Lingkungan	1 Dokumen	337.500.000	
28	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan	Pekanbaru	Jumlah unit sarana dan prasarana yang memadai di UPT Laboratorium	86 Unit	375.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan	Pekanbaru	Jumlah unit sarana dan prasarana yang memadai di UPT Laboratorium	86 Unit	375.000.000	

			Lingkungan					Lingkungan			
29	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang dibina tentang Pendidikan Lingkungan Hidup	12 Kab/Kota	248.250.000	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang dibina tentang Pendidikan Lingkungan Hidup	12 Kab/Kota	248.250.000	
30	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Provinsi Riau	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Riau	1 Dokumen	454.696.200	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Provinsi Riau	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Riau	1 Dokumen	454.696.200	
31	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Riau (d/h SLHD)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen IKPLHD Provinsi Riau dan terselenggaranya penilaian Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	1 Dokumen	260.216.200	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Riau (d/h SLHD)	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen IKPLHD Provinsi Riau dan terselenggaranya penilaian Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	1 Dokumen	260.216.200	
32	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Provinsi Riau	Jumlah Unit Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	24 Unit	884.065.000	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Provinsi Riau	Jumlah Unit Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	24 Unit	884.065.000	

33	Pengembangan Kearifan Lokal	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang dapat pembinaan kearifan lokal (penghargaan lingkungan hidup)	6 Kab/Kota	239.067.000	Pengembangan Kearifan Lokal	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang dapat pembinaan kearifan lokal (penghargaan lingkungan hidup)	6 Kab/Kota	239.067.000	
34	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Provinsi Riau	Jumlah Lokasi Keanekaragaman Hayati di Areal Izin Usaha/Kegiatan	12 Lokasi	157.806.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Provinsi Riau	Jumlah Lokasi Keanekaragaman Hayati di Areal Izin Usaha/Kegiatan	12 Lokasi	157.806.000	
35	Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah lokasi kampung iklim di Provinsi Riau yang dibina	7 Lokasi	262.500.000	Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah lokasi kampung iklim di Provinsi Riau yang dibina	7 Lokasi	262.500.000	
36	Identifikasi Pengembangan dan Pengelolaan Program Riau Hijau di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	Identifikasi Pengembangan dan Pengelolaan Program Riau Hijau di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	
37	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Kawasan Bekas Tambang Rakyat	Kabupaten Kuantan Singingi	Luas rehabilitasi dan pemulihan kawasan bekas tambang rakyat	30 Ha	335.508.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Kawasan Bekas Tambang Rakyat	Kabupaten Kuantan Singingi	Luas rehabilitasi dan pemulihan kawasan bekas tambang rakyat	30 Ha	335.508.000	

38	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut	Kab. Kep. Meranti, Kab. Bengkalis, dan Kota Dumai	Luasan yang dilakukan pemulihan Mangrove Hutan Bakau dalam upaya pengendalian kerusakan kawasan pesisir dan laut	30 Ha	433.500.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut	Kab. Kep. Meranti, Kab. Bengkalis, dan Kota Dumai	Luasan yang dilakukan pemulihan Mangrove Hutan Bakau dalam upaya pengendalian kerusakan kawasan pesisir dan laut	30 Ha	433.500.000	
39	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT, Laboratorium Lingkungan	Pekanbaru	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT Laboratorium Lingkungana	12 Bulan	300.000.000	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT, Laboratorium Lingkungan	Pekanbaru	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT Laboratorium Lingkungana	12 Bulan	300.000.000	
40	Pengelolaan Data Informasi dan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pekanbaru	Jumlah Jenis Dokumen	8 Jenis Dokumen	430.405.600	Pengelolaan Data Informasi dan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pekanbaru	Jumlah Jenis Dokumen	8 Jenis Dokumen	430.405.600	
41	Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	262.500.000	Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	262.500.000	
42	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Provinsi Riau	Jumlah Unit	2 Unit	500.000.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	Provinsi Riau	Jumlah Unit	2 Unit	500.000.000	

						Lingkungan Hidup					
	URUSAN PILIHAN				**14.129.913.770**	**URUSAN PILIHAN**				**14.129.913.770**	
	URUSAN PILIHAN				**14.129.913.770**	**URUSAN PILIHAN**				**14.129.913.770**	
	KEHUTANAN				**14.129.913.770**	**KEHUTANAN**				**14.129.913.770**	
	PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**	**700000 Ha**	**10.757.555.870**	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**	**700000 Ha**	**10.757.555.870**	
43	Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Riau	Jumlah Badan Usaha	35 Perusahaan	150.000.000	Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi Riau	Jumlah Badan Usaha	35 Perusahaan	150.000.000	
44	Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Hak/Rakyat	Provinsi Riau	Jumlah Unit Pemanfaatan Hutan Rakyat	30 Unit	187.131.400	Peningkatan Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Hak/Rakyat	Provinsi Riau	Jumlah Unit Pemanfaatan Hutan Rakyat	30 Unit	187.131.400	
45	Asistensi Pengendalian Pelaksanaan RKU, RKT dan RPHD pada Perizinan Perhutanan Sosial	Provinsi Riau	Jumlah izin dalam tertibnya pelaksanaan PS yang berorientasi	20 Izin	300.000.000	Asistensi Pengendalian Pelaksanaan RKU, RKT dan RPHD pada	Provinsi Riau	Jumlah izin dalam tertibnya pelaksanaan PS yang berorientasi	20 Izin	300.000.000	

			masyarakat			Perizinan Perhutanan Sosial		masyarakat			
46	Penyuluhan dan Pengawasan Perlindungan Hutan pada Hutan Adat/HKm/Desa	Provinsi Riau	Jumlah Lokasi Penyuluhan dan Pengawasan perlindungan hutan pada hutan adat/Hkm/Desa	3 Lokasi	247.520.000	Penyuluhan dan Pengawasan Perlindungan Hutan pada Hutan Adat/HKm/Desa	Provinsi Riau	Jumlah Lokasi Penyuluhan dan Pengawasan perlindungan hutan pada hutan adat/Hkm/Desa	3 Lokasi	247.520.000	
47	Penyusunan desain tapak pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di wilayah UPT KPH Rokan	Kab. Rokan Hulu	Jumlah dokumen penyusunan desain tapak pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di wilayah UPT KPH Rokan	3 Dokumen	450.000.000	Penyusunan desain tapak pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di wilayah UPT KPH Rokan	Kab. Rokan Hulu	Jumlah dokumen penyusunan desain tapak pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di wilayah UPT KPH Rokan	3 Dokumen	450.000.000	
48	Pengembangan jasa Ekowisata Sungai bersama masyarakat sekitar KPH Tasik besar serkap	Kab Pelalawan	Jumlah lokasi pemanfaatan ekowisata sungai di dalam dan sekitar areal KPH Tasik Besar Serkap bersama masyarakat Desa Sekitar Hutan	1 Lokasi	485.000.000	Pengembangan jasa Ekowisata Sungai bersama masyarakat sekitar KPH Tasik besar serkap	Kab Pelalawan	Jumlah lokasi pemanfaatan ekowisata sungai di dalam dan sekitar areal KPH Tasik Besar Serkap bersama masyarakat Desa Sekitar Hutan	1 Lokasi	485.000.000	
49	Pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan sarana prasarana wisata	Provinsi Riau	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	982.403.800	Pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan	Provinsi Riau	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	982.403.800	

	tahura SSH					sarana prasarana wisata tahura SSH					
50	Inventarisasi Potensi Ekowisata dan Jasa Lingkungan di UPT KPH Suligi Batu Gajah	Kab. Kampar	Jumlah lokasi potensi ekowisata dan jasa lingkungan di KPH Suligi Batu Gajah	1 Lokasi	300.000.000	Inventarisasi Potensi Ekowisata dan Jasa Lingkungan di UPT KPH Suligi Batu Gajah	Kab. Kampar	Jumlah lokasi potensi ekowisata dan jasa lingkungan di KPH Suligi Batu Gajah	1 Lokasi	300.000.000	
51	Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen	1 Dokumen	300.000.000	Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah dokumen	1 Dokumen	300.000.000	
52	Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Perambahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal	Provinsi Riau	Jumlah Laporan	25 Laporan	197.092.700	Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Perambahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal	Provinsi Riau	Jumlah Laporan	25 Laporan	197.092.700	
53	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas Tahura	Provinsi Riau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas tahura	12 Bulan	575.000.000	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas Tahura	Provinsi Riau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas tahura	12 Bulan	575.000.000	

54	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT pelatihan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	provinsi Riau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT pelatihan kehutanan dan pemberdayaa n masyarakat	12 Bulan	499.962.500	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT pelatihan kehutanan dan pemberdayaa n masyarakat	provinsi Riau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT pelatihan kehutanan dan pemberdayaa n masyarakat	12 Bulan	499.962.500	
55	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan	Provinsi Riau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan	12 Bulan	252.859.400	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan	Provinsi Riau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan	12 Bulan	252.859.400	
56	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	Kab. Bengkalis	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	12 Bulan	450.000.000	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	Kab. Bengkalis	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	12 Bulan	450.000.000	
57	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau	kab. Siak	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan	12 Bulan	386.417.370	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT	kab. Siak	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan	12 Bulan	386.417.370	

			tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau			KPH Mandau		tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau			
58	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	Kabupaten Rokan Hulu	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	12 Bulan	350.000.000	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	Kabupaten Rokan Hulu	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	12 Bulan	350.000.000	
59	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	Kabupaten Kampar	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	12 Bulan	450.000.000	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	Kabupaten Kampar	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	12 Bulan	450.000.000	
60	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	Kab. Pelalawan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	12 Bulan	350.000.000	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	Kab. Pelalawan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	12 Bulan	350.000.000	
61	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi	Kab. Kepulauan Meranti	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan	12 Bulan	455.999.900	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT	Kab. Kepulauan Meranti	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan	12 Bulan	455.999.900	

			tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi			KPH Tebing tinggi		tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi			
62	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	UPT KPH Mandah	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	12 Bulan	434.299.100	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	UPT KPH Mandah	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	12 Bulan	434.299.100	
63	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	Kab Indragiri Hulu dan Kab.indragiri Hilir	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	12 Bulan	498.712.500	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	Kab Indragiri Hulu dan Kab.indragiri Hilir	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	12 Bulan	498.712.500	
64	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Singingi	Kab. Kuantan Singingi	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada UPT KPH Singingi	12 Bulan	425.000.000	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Singingi	Kab. Kuantan Singingi	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada UPT KPH Singingi	12 Bulan	425.000.000	
65	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap	Kab Pelalawan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan	12 Bulan	375.000.000	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT	Kab Pelalawan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan	12 Bulan	375.000.000	

			tugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap			KPH Tasik Besar Serkap		tugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap			
66	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api	Rokan hilir dan Dumai	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api	12 Bulan	487.777.500	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api	Rokan hilir dan Dumai	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api	12 Bulan	487.777.500	
67	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	Kab. Kampar	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	12 Bulan	327.135.900	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	Kab. Kampar	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	12 Bulan	327.135.900	
68	Rekonsiliasi PNBP (Peningkatan Penerimaan Negara) Sektor Kehutanan	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	290.243.800	Rekonsiliasi PNBP (Peningkatan Penerimaan Negara) Sektor Kehutanan	Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	290.243.800	
69	Pengembangan Perbenihan	Provinsi Riau	Jumlah Bibit	200000 Batang	350.000.000	Pengembang an Perbenihan	Provinsi Riau	Jumlah Bibit	200000 Batang	350.000.000	
70	Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan	Provinsi Riau	Jumlah Kelompok Tani	2 Kelompok Tani	200.000.000	Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok	Provinsi Riau	Jumlah Kelompok Tani	2 Kelompok Tani	200.000.000	

	Rehabilitasi Hutan dan Lahan					Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan					
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN		**Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis**	**20.74 Persen**	**3.372.357.900**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**		**Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis**	**20.74 Persen**	**3.372.357.900**	
71	Pengembangan tanaman lokal dan tanaman serba guna (MPTS) di kawasan areal masyarakat hutan adat	Provinsi Riau	Jumlah lokasi pengembangan tanaman lokal dan tanaman serba guna (MPTS) di kawasan areal masyarakat hutan adat	6 Lokasi	413.750.800	Pengembangan tanaman lokal dan tanaman serba guna (MPTS) di kawasan areal masyarakat hutan adat	Provinsi Riau	Jumlah lokasi pengembangan tanaman lokal dan tanaman serba guna (MPTS) di kawasan areal masyarakat hutan adat	6 Lokasi	413.750.800	
72	Aksi serentak menanam pohon dan penghijauan dan konservasi alam Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Lokasi Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam Provinsi Riau	1 Lokasi	344.308.000	Aksi serentak menanam pohon dan penghijauan dan konservasi alam Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Lokasi Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam Provinsi Riau	1 Lokasi	344.308.000	
73	Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian	Kab Kampar	Jumlah unit sarana dan prasarana persemaian yang layak dan memadai	1 Unit	478.838.900	Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian	Kab Kampar	Jumlah unit sarana dan prasarana persemaian yang layak dan memadai	1 Unit	478.838.900	

74	Pengembangan Data dan informasi Daerah Aliran Sungai	Provinsi Riau	Jumlah dokumen Groundcheck kondisi penutupan lahan kritis di Provinsi Riau	1 Dokumen	218.912.000	Pengembangan Data dan informasi Daerah Aliran Sungai	Provinsi Riau	Jumlah dokumen Groundcheck kondisi penutupan lahan kritis di Provinsi Riau	1 Dokumen	218.912.000	
75	Penanganan dan penyelesaian perkara /kasus tindak pidana kehutanan	Provinsi Riau	Jumlah perkara /kasus tindak pidana kehutanan yang terselesaikan	2 Kasus	406.599.400	Penanganan dan penyelesaian perkara /kasus tindak pidana kehutanan	Provinsi Riau	Jumlah perkara /kasus tindak pidana kehutanan yang terselesaikan	2 Kasus	406.599.400	
76	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-DR	Provinsi Riau	Jumlah Laporan	12 Laporan	209.948.800	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-DR	Provinsi Riau	Jumlah Laporan	12 Laporan	209.948.800	
77	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	11 Kab/Kota	400.000.000	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	11 Kab/Kota	400.000.000	
78	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	10 Ha	400.000.000	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	Provinsi Riau	Jumlah Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	10 Ha	400.000.000	
79	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Provinsi Riau	Jumlah Lokasi	5 Lokasi	200.000.000	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Provinsi Riau	Jumlah Lokasi	5 Lokasi	200.000.000	

80	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Provinsi Riau	Frekuensi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	13 Kali	300.000.000	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Provinsi Riau	Frekuensi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	13 Kali	300.000.000	
					30.680.615.932					**30.680.615.932**	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan :

- Dari hasil pencermatan tidak ada perbedaan antara Rancangan awal RKPD tahun 2021 dengan Hasil Analisis Kebutuhan yaitu dari pagu awal sebesar Rp. 30.680.615.932 menjadi Rp. 30.680.615.932.

2.5. Penalaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi Riau menyelenggarakan rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan, salah satunya forum konsultasi publik. Pelaksanaan forum konsultsai publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan.

Melalui forum konsultasi publik tersebut diharapkan mendapat masukan penting yang lebih menitikberatkan pada aspek teknokratis, oleh karena itu forum konsulatsi dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan utama. Dari hasil forum konsultasi tersebut berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan lebih terkait pada sektor pelayanan publik di sektor-sektor pembangunan. Berikut ini disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2021 (Tabel TC. 32).

TABEL T-C.32

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021

PROVINSI RIAU

PD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**		Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan		
1	Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kota Pekanbaru	Persentase dokumen Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	100%	Dapat diterima dan di sesuaikan dengan anggaran yang ada
2	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Jumlah Dokumen Perencanaan KPH	1 Dokumen	
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**		Persentase penurunan luasan lahan kritis		
1	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Persentase luas rehabilitasi DAS	100%	Dapat diterima sesuai Luas dan lokasi yang diusulkan
2	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Kec. Bantan Kab.Bengkalis	Jumlah Lahan Mangrove Yang Direhab	16 Ha	

Usulan Program dan kegiatan pada tabel T-C 32 yang diperoleh dari Pemangku Kepentingan (DPR) Tahun 2021 berupa POKIR,. Usulan tersebut diterima karena sesuai dengan anggaran yang ada dan luas lokasi yang diusulkan serta terkait pada sektor-sektor pembangunan yang sesuai dengan isu-isu strategis dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagai program dan kegiatan masyarakat.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 adalah RKP kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pada RPJMN sebelumnya RKP difokuskan pada infrastruktur yang memang sangat dibutuhkan untuk peningkatan daya saing ekonomi sekaligus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. RPJMN berikutnya akan berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, sehingga tema RKP Pemerintah Pusat pada tahun 2021 yaitu "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".

Tema RKP 2021 dijabarkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional, yaitu (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Berkebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim dan (7) Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahananndan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik. Ketujuh Prioritas tersebut akan disinergikan dengan lima pengarusutamaan, yaitu: Kesetaraan Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Transformasi Digital. Tujuh Prioritas Nasional ini selain harus didukung oleh Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga melalui penetapan Program, Kegiatan serta Proyek Prioritas, juga harus didukung oleh Pemerintah Daerah melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan dalam PN 1; Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, yaitu: a) Industri 4.0 di 5 sub sektor Prioritas; b) 10 destinasi pariwisata prioritas; c) 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter; dan d) Penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan. Kebijakan untuk PN 2; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, yaitu Pusat kegiatan strategis nasional. Kebijakan untuk PN 3; Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, yaitu: a) Pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Industri 4.0; b) Integrasi bantuan social menuju skema perlindungan sosial menyeluruh dan c) Penguatan sistem kesehatan nasional. Pada PN 4; Revolusi Mental dan Pembangunan Berkebudayaan adalah Memberi dukungan terhadap PN 1, PN 2 dan PN 3. Untuk PN 5; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar kebijakannya adalah Jaringan pelabuhan utama terpadu. Pada PN 6; Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim adalah Penguatan sistem peringatan dini bencana dan pada PN 7; Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahananndan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik adalah Penguatan NSOC – SOC dan pembentukan 121 CSIRT.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Table 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatkan Good goverment dan clean goverment	Terwujudnya pengikatan kualitas pelayanan internal SKPD	Presentase layanana adminsitrasi perkantoran yang baik	100
			Presentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	100
			Presentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	100
2	Meningkat indeks kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin) (IKLH 2017 -> 68,64) (IKLH 2018 --> 68,43) 67)	68.00
		Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air 2017 = 65,23 2018 = 73,68	58,60
		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara 2017 = 90,90 2018 = 89,91	92,1
		Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan 2017 = 54,51 2018 = 48,37	58,09
3	Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Di Provinsi Riau	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (%)	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah 2017 --> 166.526,36 Gg CO2	302,901
		Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan (%)	Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan 2017 --> 130.061,86 Gg CO2	1
			Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	700

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka pelayanan maupun kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Pada dokumen Renja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau untuk tercapainya tujuan dan merupakan tolok ukur (*benchmarks*) bagi proses keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Memperhatikan kebijakan pembangunan nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta mencermati Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau diperoleh hasil penyelarasan Rencana Kerja (Renja) Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2021 yang di usulkan berdasarkan Forum Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Riau, maka terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun program dan kegiatan diantaranya adalah :

1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun Kedua(2021) :
   a) Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan;
   b) Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau melaui Pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta restorasi gambut;
   c) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS.

2. Penyesuaian terhadap UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Menghindari pelaksanaan pembangunan yang bukan kewenangan pemerintah provinsi.
4. Mengakomodir kegiatan baru yang merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.
5. Identifikasi program/kegiatan strategis daerah (pariwisata berbasis budaya, koordinasi supervisi KPK, penanganan karhutla, dll).

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau mengusulkan 6 program yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2021 yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
5. Program Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
6. Program Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Adapun rincian rencana kegiatan per program Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021 sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

TABEL T-C.33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

PROVINSI RIAU

PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI RIAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja Langsung				32.434.196.023				36.384.579.882
1.02	***05.01.0.0.***	***00***	**01**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran**		100 %	6.706.955.934			100 %	7.402.673.541,95
1.02	*05.01.0.0.*	00	01	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah surat yang Dikirim	Prov. Riau	2000 Surat	18.800.000	APBD		3000 Surat	63.072.836,26

1.02	*05.01.0.00.00*	00	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Rekening yang dibayar	Prov. Riau	26	Rekening	1.760.000.000	APBD		26	Rekening	1.760.000.000,00
1.02	*05.01.0.00.00*	00	01	003	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Prov. Riau	44	Unit	595.123.372	APBD		44	Unit	736.682.806,36
1.02	*05.01.0.00.00*	00	01	004	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	Prov. Riau	12	Bulan	505.131.081	APBD		12	Bulan	538.008.746,36
1.02	*05.01.0.00.00*	00	01	007	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	Prov. Riau	45	Jenis	139.613.413	APBD		45	Jenis	191.497.744,16
1.02	*05.01.0.00.00*	00	01	008	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Jenis Laporan yang dicetak dan digandakan	Prov. Riau	18	Jenis	83.609.588	APBD		18	Jenis	133.519.207,22
1.02	*05.01.0.00.00*	00	01	009	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Prov. Riau	12	Bulan	203.591.940	APBD		12	Bulan	259.560.006,36
1.02	*05.01.0.00.00*	00	01	010	Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	Prov. Riau	10000	Porsi	319.994.020	APBD		10000	Porsi	383.392.006,36

						yang disediakan								
1.02	*05.01.0.00.00*	00	01	011	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dalam dan Luar Provinsi	100	Kali	967.241.959	APBD		100	Kali	1.071.953.643,40
1.02	*05.01.0.00.00*	00	01	012	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga Administrasi Kantor yang disediakan	Prov. Riau	50	OB	1.147.585.034	APBD		50	OB	1.182.725.876,73
1.02	*05.01.0.00.00*	00	01	013	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.	Jumlah Tenga Satpam yang disediakan	Prov. Riau	17	OB	492.357.170	APBD		17	OB	535.230.006,36
1.02	*05.01.0.00.00*	00	01	014	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Barang Milik Daerah OPD	Prov. Riau	100	Persen	473.908.357	APBD		100	Persen	547.030.662,36
1.02	***05.01.0.00.00***	***00***	**02**		**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Aparatur**		**100**	**%**	**451.600.180**			**100**	**%**	**513.465.400,10**
1.02	*05.01.0.00.00*	00	02	001	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	Pekanbaru	22	Unit	168.440.393	APBD		22	Unit	168.440.393
1.02	*05.01.0.00.00*	00	02	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Pekanbaru	12	Unit	117.868.393	APBD		12	Unit	117.868.393

1.02	*05.01.0.00.00*	00	02	003	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Pekanbaru	400	Unit	165.291.393	APBD		400	Unit	165.291.393
1.02	***05.01.0.00.00***	***00***	**03**		**Program peningkatan Disiplin Aparaturaparatur**	**Persentase tingkat kehadiran ASN**		100	%	592.200.000			100	%	592.200.000
1.02	*05.01.0.00.00*	*00*	03	001	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya.	Jumlah Pakaian Dinas PDH beserta kelengkapannya yang diadakan	Pekanbaru	850	Stel	592.200.000	APBD		850	Stel	592.200.000
1.02.	**05.01.1.2.**	***05***	**15**		**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	**Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**		**0,77**	**Persen**	**8.990.979.281**			**0,66**	**Persen**	**10.120.995.396,20**
1.02.	05.01.1.2.	05	15	001	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura	Jumlah kab/kota yang meningkat kebersihan dan keteduhannya	Prov. Riau	12	Kab/ Kota	107.963.606	APBD		12	Kab/ Kota	138.975.285,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	002	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah dokumen pemantauan kualitas lingkungan	Prov. Riau	4	Dokumen	1.025.295.600	APBD		4	Dokumen	1.114.860.375,00

1.02.	05.01.1.2.	05	15	003	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	Jumlah Segmen	Prov. Riau	1	Segmen	318.494.560	APBD		1	Segmen	362.944.375,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	004	Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang terhimpun data pengurangan dan penanganan sampah terkait kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) Provinsi Riau	Prov. Riau	12	Kab/ Kota	275.137.624	APBD		12	Kab/ Kota	316.819.975,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	005	Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	Frekuensi Event Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	Prov. Riau	2	Kali	284.947.370	APBD		2	Kali	327.255.875,20
1.02.	05.01.1.2.	05	15	006	Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	Jumlah kasus pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi	Prov. Riau	65	Kasus	322.472.640	APBD		70	Kasus	367.176.375,00

1.02.	05.01.1.2.	05	15	007	Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	Jumlah lokasi meningkatnya kinerja KPA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan terlaksananya penaatan usaha/kegiatan di kabupaten/kota	Prov. Riau	12	Lokasi	279.007.698	APBD		12	Lokasi	320.937.075,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	008	Pengawasan Izin Lingkungan	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi izin lingkungannya	Prov. Riau	55	Usaha/ Kegiatan	133.506.508	APBD		60	Usaha/ Kegiatan	166.148.575,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	009	Asistensi KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/ Kota Asistensi dan Validasi KLHS KRP Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	Prov. Riau	12	Kab/ Kota	189.500.297	APBD		12	Kab/ Kota	225.716.436,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	010	Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Kab/ Kota yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3	Prov. Riau	12	Kab/ Kota	181.909.740	APBD		12	Kab/ Kota	217.641.375,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	011	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen	Prov. Riau	4	Dokumen	161.171.742	APBD		4	Dokumen	195.579.675,00

1.02.	05.01.1.2.	05	15	012	Penyusunan DED dan Izin Lingkungan Laboratorium Lingkungan UPT.Laboratorium Lingkungan	Jumlah Dokumen DED dan Izin Lingkungan Laboratorium Lingkungan UPT.Laboratorium Lingkungan	Prov. Riau	1	Dokumen	317.250.000	APBD		1	Dokumen	361.620.375,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	013	Pengembangan Sarana Dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan	Jumlah unit sarana dan prasarana yang memadai di UPT Laboratorium Lingkungan	Prov. Riau	90	Unit	352.500.000	APBD		90	Unit	399.120.375,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	014	pengembangan pendidikan lingkungan hidup	Jumlah Kab/Kota yang dibina tentang Pendidikan Lingkungan Hidup	Prov. Riau	12	Kab/ Kota	233.355.000	APBD		12	Kab/ Kota	272.370.375,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	015	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Riau	Prov. Riau	1	Dokumen	333.414.428	APBD		1	Dokumen	378.816.575,00

1.02.	05.01.1.2.	05	15	016	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Riau (d/h SLHD)	Jumlah Dokumen IKPLHD Provinsi Riau dan terselenggaranya penilaian Dokumen IKPLHD Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau	Prov. Riau	1	Dokumen	244.603.228	APBD		1	Dokumen	284.336.575,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	017	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Unit Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Prov. Riau	24	Unit	831.021.100	APBD		24	Unit	908.185.375,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	018	Pengembangan Kearifan lokal	Jumlah Kab/Kota yang dapat pembinaan kerifan lokal (penghargaan Lingkungan Hidup)	Prov. Riau	7	Kab/ Kota	224.722.980	APBD		8	Kab/ Kota	263.187.375,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	019	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah lokasi keanekaragaman hayati di areal izin usaha/ kegiatan	Prov. Riau	12	Lokasi	242.337.640	APBD		12	Lokasi	281.926.375,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	020	Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau	Jumlah Lokasi Kampung Iklim di Provinsi Riau yang dibina	Prov. Riau	7	Lokasi	246.750.000	APBD		7	Lokasi	286.620.375,00

1.02.	05.01.1.2.	05	15	021	Identifikasi Pengembangan dan Pengelolaan Program Riau Hijau di Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	Prov. Riau	1	Dokumen	188.000.000	APBD		1	Dokumen	224.120.375,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	022	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemulihan Kawasan Bekas Tambang Rakyat	Luas Rehabilitasi dan Pemulihan Kawasan Bekas Tambang Rakyat	Prov. Riau	30	Ha	315.377.520	APBD		30	Ha	359.628.375,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	023	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan ekosistem kawasan pesisir dan laut	Luasan yang dilakukan pemulihan mangrove dalam upaya pengendalian kerusakan kawasan pesisir dan laut	Prov. Riau	30	Ha	313.490.000	APBD		30	Ha	357.620.375,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	027	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT. Laboratorium Lingkungan	Rentang Waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT Laboratorium Lingkungan	Prov. Riau	12	Bulan	282.000.000	APBD		12	Bulan	324.120.375,00

1.02.	05.01.1.2.	05	15	028	Pengelolaan Data Informasi dan perencanaan Program /Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Jenis Dokumen	Prov. Riau	8	Jenis	400.000.000	APBD		8	Jenis	354.525.975,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	030	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Unit	Prov. Riau	2	Unit	282.000.000	APBD		2	Unit	424.120.375,00
1.02.	05.01.1.2.	05	15	032	Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	Prov. Riau	1	Dokumen	217.375.000	APBD		1	Dokumen	243.310.187,50
1.02.	05.01.1.2.	06	16	033	Pembinaan Kota Bersih	Jumlah Kab/Kota Bersih	Prov. Riau	12	Kab/Kota	94.000.000	APBD		12	Kab/Kota	100.000.000,00
1.02.	05.01.1.2.	07	17	034	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)	Prov. Riau	1	Dokumen	311.375.000	APBD				

1.02.	05.01.1.2.	07	17	025	Koordinasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Pemanfaatan Jasa Lingkungan	Jumlah lokasi ekowisata berbasis pemanfaatan jasa lingkungan	Prov. Riau	1	Lokasi	94.000.000	APBD		1	Lokasi	200.000.000,00
1.02.	05.01.1.2.	07	17	026	Rapat Koordinasi Teknis Lingkungan Hidup	Frekuensi Rapat Koordinasi Teknis Lingkungan Hidup	Prov. Riau	11	Kali	94.000.000	APBD		22	Kali	200.000.000,00
1.02.	05.01.1.2.	07	17	024	Penyusunan Dokumen pemantauan, evaluasi dan pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor Limbah dan Kehutanan	Jumlah Dokumen	Prov. Riau	1	Dokumen	94.000.000	APBD		1	Dokumen	143.310.187,50
1.02.	**05.01.1.2.**	**05**	**16**		**Program Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**	**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**		700000	Ha	11.196.944.417			700.000	Ha	12.717.280.239,15

1.02.	05.01.1.2.	05	16	001	Monitoring dan Validasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Badan Usaha Bidang Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Badan Usaha	Prov. Riau	35	Perusahaan	207.129.940	APBD		40	Perusahaan	235.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	002	Peningkatan Pemanfataan Hasil Hutan Hak/Rakyat	Jumlah unit Pemanfaatan Hutan Rakyat	Prov. Riau	30	Unit	207.143.465	APBD		35	Unit	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	003	Asistensi Pengendalian Pelaksanaan RKU, RKT dan RPHD pada Perizinan Perhutanan Sosial	Jumlah izin dalam tertibnya pelaksanaan PS yang berorientasi Masyarakat	Prov. Riau	20	Izin	219.057.597	APBD		25	Izin	235.515.239,15
1.02.	05.01.1.2.	05	16	004	Penyuluhan dan pengawasan perlindungan hutan pada Hutan Adat/HKm/Desa	Jumlah Lokasi Penyuluhan dan pengawasan perlindungan hutan pada Hutan Adat/HKm/Desa	Prov. Riau	3	Lokasi	194.583.019	APBD		3	Lokasi	235.505.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	16	005	Penyusunan desain tapak pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Wilayah UPT KPH Rokan	Jumlah Dokumen Penyusunan desain tapak pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di Wilayah UPT KPH Rokan	Prov. Riau		Dokumen	113.129.940	APBD			Dokumen	235.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	006	Pengembangan Jasa Ekowisata Sungai bersama Masyarakat Sekitar KPH Tasik Besar Serkap	Jumlah lokasi pemanfaatan ekowisata sungai di dalam dan sekitar areal KPH Tasik Besar Serkap bersama masyarakat Desa Sekitar Hutan	Prov. Riau	1	Lokasi	113.129.940	APBD		1	Lokasi	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	007	Pengembangan dan Pemeliharaan Pengelolaan Sarana Prasarana wisata Tahura SSH	Jumlah lokasi	Prov. Riau	1	Lokasi	301.129.940	APBD		1	Lokasi	335.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	008	Inventarisasi Potensi Ekowisata dan Jasa Lingkungan di UPT KPH Suligi Batu Gajah	Jumlah lokasi potensi ekowisata dan jasa lingkungan di KPH Suligi Batu Gajah	Prov. Riau	1	Lokasi	207.129.940	APBD		1	Lokasi	135.505.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	16	009	Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau	Jumlah laporan	Prov. Riau	13	Laporan	113.129.940	APBD		13	Laporan	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	010	Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Perambahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal	Jumlah laporan	Prov. Riau	25	Laporan	113.129.940	APBD		25	Laporan	235.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	011	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPHP Minas Tahura	Rentang Waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas Tahura	Prov. Riau	12	Bulan	113.129.940	APBD		12	Bulan	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	012	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan masyarakat	Rentang waktu Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya UPT Pelatihan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	Prov. Riau	12	Bulan	113.129.940	APBD		12	Bulan	135.505.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	16	013	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Perbenihan Tanaman Hutan	Rentang waktu Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Perbenihan Tanaman Hutan	Prov. Riau	12 Bulan	113.129.940	APBD		12 Bulan	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	014	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	Rentang waktu peningkatan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	Prov. Riau	12 Bulan	207.129.940	APBD		12 Bulan	235.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	015	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Mandau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau	Prov. Riau	12 Bulan	113.129.940	APBD		12 Bulan	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	016	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Rokan	Rentang Waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	Prov. Riau	12 Bulan	113.129.940	APBD		12 Bulan	135.505.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	16	017	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Kampar Kiri	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	Prov. Riau	12	Bulan	113.129.940	APBD		12	Bulan	235.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	018	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Sorek	Rentang Waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	Prov. Riau	12	Bulan	113.129.940	APBD		12	Bulan	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	019	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Tebing Tinggi	Rentang Waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing Tinggi	Prov. Riau	12	Bulan	207.129.940	APBD		12	Bulan	235.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	020	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Mandah	Rentang Waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	Prov. Riau	12	Bulan	207.129.940	APBD		12	Bulan	135.505.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	16	021	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Indragiri	Rentang Waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	Prov. Riau	12 Bulan	207.129.940	APBD		12 Bulan	235.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	022	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Singingi	Rentang Waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada UPT KPH Singingi	Prov. Riau	12 Bulan	207.129.940	APBD		12 Bulan	235.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	023	Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaantugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap	Prov. Riau	12 Bulan	113.129.940	APBD		12 Bulan	222.171.599,95
1.02.	05.01.1.2.	05	16	024	Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Bagan Siapi-Api	Rentang Waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api	Prov. Riau	12 Bulan	207.129.940	APBD		12 Bulan	235.505.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	16	025	Peningkatan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	Rentang Waktu Peningkatan Manajemen dan PelaksanaanTugas teknis Lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	Prov. Riau	12	Bulan	113.129.940	APBD		12	Bulan	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	026	Optimalisasi PNBP (Peningkatan Penerimaan Negara) Sektor Kehutanan	Jumlah dokumen Rekonsiliasi PNBP Sektor Kehutanan	Prov. Riau	1	Dokumen	113.129.940	APBD		1	Dokumen	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	027	Pengembangan Pembenihan	Jumlah Bibit	Prov. Riau	30.000	batang	113.129.940	APBD		20.000	batang	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	028	Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi hutan dan Lahan	Jumlah Kelompok Tani	Prov. Riau	2	Kelompok Tani	113.129.940	APBD		2	Kelompok Tani	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	029	Kemitraan Kewirausahaan Dalam Pemberdayaan Masyarakt Sekitar Hutan	Jumlah Dokumen	Prov. Riau	3	Dokumen	113.129.940	APBD		3	Dokumen	135.505.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	16	030	Sitem Informasi Kehutanan	Jumlah Sistim	Prov. Riau	1	Sistem	113.129.940	APBD		1	Sistem	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	031	Penyusunan Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Kajian		1	Dokumen	113.129.940	APBD		1	Dokumen	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	032	Identifikasi Dan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Luas Hutan Yang Teridentifikasi Dan Terselesaikan Dari Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Prov. Riau	4	Ha	113.129.940	APBD		4	Ha	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	033	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan	Dokumen Neraca Sumber Daya Hutan	Prov. Riau	1	Dokumen	113.129.940	APBD		1	Dokumen	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	034	Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan KPH	Dokumen Perencanaan KPH	Prov. Riau	1	Dokumen	113.129.940	APBD		1	Dokumen	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	035	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPHP Minas Tahura	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	16	036	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Model Tasik Besar Serkap	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	037	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bagan Siapi-Api	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	038	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bengkalis Pulau	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	039	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandau	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	040	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Rokan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	041	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Suligi - Batu Gajah	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	042	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Kampar Kiri	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	16	043	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Sorek	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	044	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Tebing Tinggi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	045	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandah	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	046	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Indragiri	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	047	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Singingi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	048	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH)	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	049	Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	16	050	Pembinaan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri, Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	207.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	051	Pendampingan dan Penilaian lomba Wana lestari	Terpilihnya Pemenang Lomba dengan katagori penyuluhan kehutanan (PNS PK-PNS), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Kelompok Tani Hutan (KTH), dan Kelompok Perhutanan Sosial Tingkat Propinsi Riau	Prov. Riau	12	Kab/ Kota	113.129.940	APBD		12	Kab/ Kota	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	052	Pelaksanaan dan Penyuluhan Sekolah Lapang	Jumlah Penyuluhan Sekolah Lapang	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	053	Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah Unit Wilayah Kerja	Prov. Riau	1	Unit Wilayah Kerja	113.129.940	APBD		1	Unit Wilayah Kerja	135.505.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	16	054	Fasilitasi Usulan Perhutanan Sosial	Jumlah Usulan	Prov. Riau	13	Usulan	113.129.940	APBD		13	Usulan	135.505.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	055	Sosialisasi Perhutanan Sosial	Jumlah Kab/Kota dalam pelaksanaan percepatan Perhutanan Sosial	Prov. Riau	11	Kab/Kota	269.466.604	APBD		11	Kab/Kota	286.666.600,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	056	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPHP Minas Tahura	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPHP Minas Tahura	Prov. Riau	1	Wilayah Kerja	269.467.544	APBD		1	Wilayah Kerja	286.667.600,05
1.02.	05.01.1.2.	05	16	057	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Model Tasik Besar Serkap	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Model Tasik Besar Serkap	Prov. Riau	1	Wilayah Kerja	269.466.604	APBD		1	Wilayah Kerja	286.666.600,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	058	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Bagan Siapi-Api	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Bagan Siapi-Api	Prov. Riau	1	Wilayah Kerja	269.466.604	APBD		1	Wilayah Kerja	286.666.600,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	059	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Bengkalis Pulau	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Bengkalis Pulau	Prov. Riau	1	Wilayah Kerja	269.466.604	APBD		1	Wilayah Kerja	286.666.600,00

1.02.	05.01.1.2.	05	16	060	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Mandau	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Mandau	Prov. Riau	1 Wilayah Kerja	269.466.604	APBD		1 Wilayah Kerja	286.666.600,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	061	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Rokan	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Rokan	Prov. Riau	1 Wilayah Kerja	269.466.604	APBD		1 Wilayah Kerja	286.666.600,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	062	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Suligi - Batu Gajah	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Suligi - Batu Gajah	Prov. Riau	1 Wilayah Kerja	269.466.604	APBD		1 Wilayah Kerja	286.666.600,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	063	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Kampar Kiri	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Kampar Kiri	Prov. Riau	1 Wilayah Kerja	269.466.604	APBD		1 Wilayah Kerja	286.666.600,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	064	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Sorek	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPHP Minas Tahura	Prov. Riau	1 Wilayah Kerja	269.466.604	APBD		1 Wilayah Kerja	286.666.600,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	065	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Tebing Tinggi	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Tebing Tinggi	Prov. Riau	1 Wilayah Kerja	269.466.604	APBD		1 Wilayah Kerja	286.666.600,00

1.02.	05.01.1.2.	05	16	066	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Mandah	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Mandah	Prov. Riau	1	Wilayah Kerja	269.466.604	APBD		1	Wilayah Kerja	286.666.600,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	067	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Indragiri	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Indragiri	Prov. Riau	1	Wilayah Kerja	269.466.604	APBD		1	Wilayah Kerja	286.666.600,00
1.02.	05.01.1.2.	05	16	068	Pendataan potensi konflik tenurial dan Hutan Adat UPT KPH Singingi	Jumlah Wilayah Kerja UPT KPH Singingi	Prov. Riau	1	Wilayah Kerja	269.466.604	APBD		1	Wilayah Kerja	286.666.600,00
1.02.	**05.01.1.2.**	**05**	**17**		**Program Perlindungan Dan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan**	**Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis**		1,00	%	4.495.516.211			1,00	%	5.037.965.304,69
1.02.	05.01.1.2.	05	17	001	Pengembangan Tanaman Lokal dan Tanaman Serba Guna (MPTS) di kawasan areal masyarakat hutan adat	Jumlah Lokasi Pengembangan Tanaman Lokal dan Tanaman Serba Guna (MPTS) di kawasan areal masyarakat hutan adat	Prov. Riau	6	Lokasi	139.020.379	APBD		6	Lokasi	100.000.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	17	002	Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam Provinsi Riau	Jumlah Lokasi Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam Provinsi Riau	Prov. Riau	1	Lokasi	167.744.147	APBD		1	Lokasi	110.868.720,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Persemaian	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Persemaian yang layak dan memadai	Prov. Riau	1	Unit	106.203.222	APBD		1	Unit	145.399.824,69
1.02.	05.01.1.2.	05	17	004	Pengembangan data dan Informasi Daerah Aliran Sungai	Jumlah Dokumen Groundcheck kondisi penutupan lahan kritis di Provinsi Riau	Prov. Riau	1	Dokumen	143.871.907	APBD		1	Dokumen	185.472.720,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	005	Penanganan dan Penyelesaian Perkara/Kasus Tindak Pidana Kehutanan	Jumlah Perkara/Kasus Tindak Pidana Kehutanan yang terselesaikan	Prov. Riau	2	Kasus	132.298.063	APBD		2	Kasus	173.160.120,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	006	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Sumber Dana DBH-DR	Jumlah Laporan	Prov. Riau	12	Laporan	200.000.000	APBD		12	Laporan	176.509.520,00

1.02.	05.01.1.2.	05	17	007	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	Prov. Riau	12	Kab/ Kota	126.094.627	APBD		12	Kab/ Kota	166.560.720,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	008	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provisi Riau	Jumlah Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Prov. Riau	10	Ha	126.094.627	APBD		10	Ha	166.560.720,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	009	Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat	Jumlah Lokasi	Prov. Riau	5	Lokasi	126.094.627	APBD		5	Lokasi	166.560.720,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	010	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Frekuensi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Prov. Riau	13	Kali	126.094.627	APBD		13	Kali	166.560.720,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	043	Penyediaan Sumber Daya Genetik	Jumlah Jenis Genetik	Prov. Riau	5	Jenis	94.000.000	APBD		5	Jenis	100.000.000
1.02.	05.01.1.2.	05	17	044	Rehabilitasi Mangrove Provinsi Riau	Jumlah Lahan Mangrove Yang Direhab	Prov. Riau	4	Ha	94.000.000	APBD		4	Ha	100.000.000
1.02.	05.01.1.2.	05	17	045	Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Desa/ Kelurahan yang diberikan kampanya kebakaran	Prov. Riau	78	Desa/Kelurahan	76.610.000	APBD		78	Desa/Kelurahan	81.500.000,00

						hutan dan lahan								
1.02.	05.01.1.2.	05	17	046	Penanganan Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah kasus sengketa Lingkungan Hidup Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan yang diselesaikan	Prov. Riau	3	Kasus	156.039.987	APBD		3	Kasus	163.000.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	047	Penanganan Penegakan Hukum Pidana Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Kasus Yang Ditangani	Prov. Riau	2	Kasus	76.610.000	APBD		2	Kasus	163.905.760,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	048	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Alat Pencegahan Kebakaran Hutan dan lahan	Prov. Riau	5	Set	76.610.000	APBD		5	Set	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	049	Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Patroli pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Prov. Riau	10	Kali	76.610.000	APBD		10	Kali	81.500.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	17	030	Penyelenggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPHP Minas Tahura	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Prov. Riau	1	Wilaya Kerja KPH	76.610.000	APBD		1	Wilaya Kerja KPH	172.250.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	031	Penyelenggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Model Tasik Besar Serkap	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Prov. Riau	1	Wilaya Kerja KPH	76.610.000	APBD		1	Wilaya Kerja KPH	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	032	Penyelenggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bagan Siapi-Api	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Prov. Riau	1	Wilaya Kerja KPH	76.610.000	APBD		1	Wilaya Kerja KPH	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	033	Penyelenggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Bengkalis Pulau	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Prov. Riau	1	Wilaya Kerja KPH	76.610.000	APBD		1	Wilaya Kerja KPH	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	034	Penyelenggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Mandau	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Prov. Riau	1	Wilaya Kerja KPH	76.610.000	APBD		1	Wilaya Kerja KPH	81.500.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	17	035	Penyelenggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Rokan	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Prov. Riau	1	Wilaya Kerja KPH	76.610.000	APBD		1	Wilaya Kerja KPH	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	036	Penyelenggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Suligi - Batu Gajah	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Prov. Riau	1	Wilaya Kerja KPH	76.610.000	APBD		1	Wilaya Kerja KPH	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	037	Penyelenggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Kampar Kiri	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Prov. Riau	1	Wilaya Kerja KPH	76.610.000	APBD		1	Wilaya Kerja KPH	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	038	Penyelenggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Sorek	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Prov. Riau	1	Wilaya Kerja KPH	76.610.000	APBD		1	Wilaya Kerja KPH	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	039	Penyelenggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Tebing Tinggi	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Prov. Riau	1	Wilaya Kerja KPH	76.610.000	APBD		1	Wilaya Kerja KPH	81.500.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	17	068	Penyelenggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Mandah	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Prov. Riau	1	Wilaya Kerja KPH	76.610.000	APBD		1	Wilaya Kerja KPH	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	040	Penyelenggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Indragiri	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Prov. Riau	1	Wilaya Kerja KPH	76.610.000	APBD		1	Wilaya Kerja KPH	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	041	Penyelenggaran Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla UPT KPH Singingi	Jumlah Wilayah Kerja KPH	Prov. Riau	1	Wilaya Kerja KPH	76.610.000	APBD		1	Wilaya Kerja KPH	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	050	Penyelenggaran Bimtek pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Siaga Trampil dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Prov. Riau	25	Orang	76.610.000	APBD		25	Orang	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	042	Penyusunan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi hutan dan Lahan	Jumlah Dokumen	Prov. Riau	1	Dokumen	76.610.000	APBD		1	Dokumen	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	051	Rehabilitasi Lahan melalui Penghijauan Lingkungan	Jumlah Areal yang direhabilitasi	Prov. Riau	2	Ha	76.610.000	APBD		2	Ha	81.500.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	17	052	Pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) UPT KPHP Minas Tahura	Jumlah Unit Areal wilayah kerja UPT KPHP Minas Tahura	Prov. Riau	2	Unit	76.610.000	APBD		2	Unit	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	053	Penyusunan Data dan informasi pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah Dokumen	Prov. Riau	1	Dokumen	76.610.000	APBD		1	Dokumen	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	054	Pembinaan perbenihan tanaman hutan	Jumlah Sumber Benih yang dibina	Prov. Riau	13	Sumber Benih	76.610.000	APBD		13	Sumber Benih	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	055	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT KPH UPT KPHP Minas Tahura	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Riau	10	Kali	76.610.000	APBD		10	Kali	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	056	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT KPH Model Tasik Besar Serkap	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Riau	10	Kali	76.610.000	APBD		10	Kali	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	057	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Riau	10	Kali	76.610.000	APBD		10	Kali	81.500.000,00

					UPT KPH Bagan Siapi-Api									
1.02.	05.01.1.2.	05	17	058	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT KPH Bengkalis Pulau	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Riau	10	Kali	76.610.000	APBD		10 Kali	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	059	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT KPH Mandau	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Riau	10	Kali	76.610.000	APBD		10 Kali	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	060	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT KPH Rokan	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Riau	10	Kali	76.610.000	APBD		10 Kali	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	061	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT KPH Suligi - Batu Gajah	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Riau	10	Kali	76.610.000	APBD		10 Kali	81.500.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	17	062	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT KPH Kampar Kiri	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Riau	10	Kali	76.610.000	APBD		10	Kali	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	063	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT KPH Sorek	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Riau	10	Kali	76.610.000	APBD		10	Kali	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	064	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT KPH Tebing Tinggi	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Riau	10	Kali	76.610.000	APBD		10	Kali	81.500.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	065	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT KPH Mandah	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Riau	10	Kali	76.610.000	APBD		11	Kali	90.750.000,00
1.02.	05.01.1.2.	05	17	066	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT KPH Indragiri	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Riau	10	Kali	76.610.000	APBD		10	Kali	81.500.000,00

1.02.	05.01.1.2.	05	17	067	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Hutan UPT KPH Singingi	Jumlah Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Prov. Riau	10 Kali	76.610.000	APBD		20 Kali	82.405.760,00
TOTAL									**32.434.196.023**				**36.384.579.882**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rennja Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau tahun 2021 memiliki total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 23.081.691.700,- yang mencakup 5 program dan 83 Kegiatan. Rincian anggaran untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel TC. 34 berikut :

Tabel. T.C. 34 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	PAGU (Rp)	CATATAN
1	2	3	5	6	8
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100 Persen**	**5,485,956,928**	
1	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	149 Surat	8,000,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	26 Rekening	1,200,000,000	
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	41 Unit	300,000,000	
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	685,468,500	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	54 Jenis	185,000,000	
6	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	12 Jenis	75,850,000	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	30,000,000	
8	Penyediaaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	10000 Porsi/Box	274,998,000	
9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	75 Kali	701,128,000	
10	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	50 OB	1,173,162,428	

11	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	17 OB	502,350,000	
12	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100 Persen	350,000,000	
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**	**100 Persen**	**335,000,000**	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	8 Unit	85,000,000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 Unit	100,000,000	
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	291 Unit	150,000,000	
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Peningkatan Kualitas Udara; Persentase Peningkatan Kualitas Air;**	**0.77 Poin; 0.02 Poin;**	**5,767,756,520**	
1	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Kab/Kota yang meningkat kebersihan dan keteduhannya	12 Kab/Kota	91,300,000	
2	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Dokumen Pemantauan Kualitas Lingkungan	4 Dokumen	521,946,000	
3	Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang terhimpun data pengurangan danpenanganan sampah terkait Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi Riau	12` Kab/Kota	150,000,000	
4	Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	Frekuensi Event Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	2 Kali	250,000,000	
5	Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup yang diverifikasi	50 Kasus	200,000,000	
6	Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	Jumlah lokasi meningkatnya kinerja KPA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan terlaksananya penataan usaha/kegiatan di kabupaten kota	12 Lokasi	150,000,000	
7	Pengawasan Izin Lingkungan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi izin lingkungannya	17 Usaha/Kegiatan	149,962,000	
8	Asistensi KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota Asistensi dan Validasi KLHS KRP Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	12 Kab/Kota	428,778,000	

9	Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Kab/Kota yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3	12 Kab/Kota	150,000,000	
10	Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan	Jumlah unit sarana dan prasarana yang memadai di UPT Laboratorium Lingkungan	90 Unit	1,000,000,000	
11	Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	Jumlah Kab/Kota yang dibina tentang Pendidikan Lingkungan Hidup	12 Kab/Kota	150,000,000	
12	Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Riau	1 Dokumen	650,000,000	
13	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Provinsi Riau (d/h SLHD)	Jumlah Dokumen IKPLHD Provinsi Riau dan terselenggaranya penilaian Dokumen IKPLHD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	1 Dokumen	100,000,000	
14	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Unit Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	24 Unit	200,000,000	
15	Pengembangan Kearifan Lokal	Jumlah Kab/Kota yang dapat pembinaan kearifan lokal (penghargaan lingkungan hidup)	5 Kab/Kota	180,000,000	
16	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah Lokasi Keanekaragaman Hayati di Areal Izin Usaha/Kegiatan	10 Lokasi	109,698,000	
17	Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau	Jumlah lokasi kampung iklim di Provinsi Riau yang dibina	5 Lokasi	125,000,000	
18	Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT, Laboratorium Lingkungan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT Laboratorium Lingkungana	12 Bulan	150,187,520	
19	Pengelolaan Data Informasi dan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Jenis Dokumen	8 Jenis Dokumen	260,885,000	
20	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Unit	4 Unit	600,000,000	
21	Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	
4	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**	**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**	**700000.00 Ha**	**9,445,278,252**	
1	Asistensi Pengendalian Pelaksanaan RKU, RKT dan RPHD pada Perizinan Perhutanan Sosial	Jumlah izin dalam tertibnya pelaksanaan PS yang berorientasi masyarakat	20 Izin	242,800,000	

2	Penyuluhan dan Pengawasan Perlindungan Hutan pada Hutan Adat/HKm/Desa	Jumlah Lokasi Penyuluhan dan Pengawasan perlindungan hutan pada hutan adat/H km/Desa	4 Lokasi	185,000,000	
3	Pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan sarana prasarana wisata tahura SSH	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	300,000,000	
4	Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau	Jumlah Laporan	13 Laporan	269,396,000	
5	Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Perambahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal	Jumlah Laporan	23 Laporan	120,000,000	
6	Optimalisasi PNBP (Peningkatan Penerimaan Negara) Sektor Kehutanan	Jumlah dokumen Rekonsiliasi PNBP Sektor kehutanan	1 Dokumen	275,000,000	
7	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas Tahura	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas tahura	12 Bulan	504,420,656	
8	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT pelatihan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT pelatihan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	12 Bulan	185,155,520	
9	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan	12 Bulan	185,607,824	
10	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	12 Bulan	250,940,896	
11	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau	12 Bulan	201,078,272	
12	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	12 Bulan	200,558,576	
13	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	12 Bulan	201,630,368	

14	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	12 Bulan	201,001,808	
15	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi	12 Bulan	276,796,256	
16	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	12 Bulan	275,271,728	
17	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	12 Bulan	200,419,904	
18	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Singingi	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada UPT KPH Singingi	12 Bulan	200,927,936	
19	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap	12 Bulan	552,462,400	
20	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bagan Siapi Api	12 Bulan	250,419,904	
21	Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	12 Bulan	203,260,304	
22	Pengembangan Perbenihan	Jumlah Bibit	70000 Batang	500,000,000	
23	Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Kelompok Tani	2 Kelompok Tani	150,000,000	
24	Kemitraan Kewirausahaan Dalam Pemberdayaan Masyarakt Sekitar Hutan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	150,000,000	
25	Identifikasi Dan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Luas Hutan Yang Teridentifikasi Dan Terselesaikan Dari Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	150 Ha	250,000,000	
26	Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan KPH	Jumlah Dokumen Perencanaan KPH	1 Dokumen	113,129,900	
27	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPHP Minas Tahura	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000	

28	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Model Tasik Besar Serkap	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000	
29	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bagan Siapi-Api	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000	
30	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bengkalis Pulau	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000	
31	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandau	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000	
32	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Rokan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000	
33	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Suligi - Batu Gajah	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000	
34	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Kampar Kiri	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000	
35	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Sorek	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000	
36	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Tebing Tinggi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000	
37	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandah	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000	
38	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Indragiri	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000	
39	Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Singingi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000	
5	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**	**Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis**	**1.00 Persen**	**2,047,700,000**	
1	Aksi serentak menanam pohon dan penghijauan dan konservasi alam Provinsi Riau	Jumlah Lokasi Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam Provinsi Riau	1 Lokasi	132,440,000	
2	Pengembangan Data dan informasi Daerah Aliran Sungai	Jumlah dokumen Groundcheck kondisi penutupan lahan kritis di Provinsi Riau	1 Dokumen	125,000,000	
3	Penanganan dan penyelesaian perkara /kasus tindak pidana kehutanan	Jumlah perkara /kasus tindak pidana kehutanan yang terselesaikan	2 Kasus	300,000,000	
4	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	12 Kab/Kota	265,000,000	
5	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	Jumlah Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	10 Ha	350,000,000	
6	Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Frekuensi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	13 Kali	200,000,000	

7	Penyediaan Sumber Daya Genetik	Jumlah Jenis Genetik	5 Jenis	376,000,000	
8	Rehabilitasi Mangrove Provinsi Riau	Jumlah Lahan Mangrove Yang Direhab	16 Ha	299,260,000	
				23,081,691,700	

BAB V
PENUTUP

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau terus berupaya mengatasi segala kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, baik kendala teknis maupun anggaran. Beberapa kendala teknis di lapangan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau diantaranya sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran, pemahaman, komitmen, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan sumber daya alam;
2. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah masih belum optimal;
3. Belum tersedianya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang komprehensif sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan Pemanfaatan dan Perencanaan kehutanan;
4. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Masih kurangnya fasilitas pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk fasilitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang kurang memadai;
7. Perambahan Kawasan Hutan;
8. Konflik Tenurial;
9. Illegal Logging;
10. Kebakaran Hutan; dan
11. Lahan Kritis.

Solusi untuk permasalahan tersebut antara lain: Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, komitmen, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta pemanfaatan sumber daya alam, Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, Percepataan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Areal Kerja Izin Kehutanan, Penyelesaian RTRWP Provinsi Riau sebagai acuan Pemanfaatan Ruang di Provinsi Riau, Pembangunan Posko Pencegahan Perambahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, Pengelolaan Hutan di Tingkat Tapak dalam Suatu Unit Manajemen, Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perhutanan Sosial. Diharapkan dengan dukungan seluruh *stakeholder*, program, kegiatan serta anggaran yang memadai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dapat mewujudkan pembangunan Provinsi Riau.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang belum sempurna dan masih banyak kekurangan dan sebagai dokumen perencanaan, dokumen ini mengikat secara kelembagaan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program kegiatan serta anggaran pada tahun 2021 guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021 mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 2019 – 2024 telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi baik dalam pelaksanaannya maupun keterbatasan anggaran.

Sesuai dengan tema RKPD Tahun 2021 "*Memantapkan pengembangan industri, pertanian, pariwisata yang mendorong perdagangan dan jasa untuk meningkatkan daya saing ekonomi*" Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berkomitmen penuh untuk melaksanakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang tertuang didalamnya, yang pada akhirnya tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan,

Pembangunan dan kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat terlaksana dengan baik.

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau akan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga hasil evaluasi, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan tersebut akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021, merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2021. Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja tahun 2021 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2021.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah - kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (Sekretariat, Bidang, UPT bersama Staf) berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2021 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Tahun 2021 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2021, dimana Renja Tahun 2021 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

3. Menjaga konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pekanbaru, Agustus 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU,

MAMUN MUROD

Pembina Utama Muda

NIP. 19660610 199203 1 008

HASIL PEMETAAN
PROGRAM/KEGIATAN PADA RKPD/RENJA PD TAHUN 2021 TERHADAP PEMUTAHIRAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019

PERANGKAT DAERAH : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU
TAHUN : 2021

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
BELANJA LANGSUNG						**23,081,691,700**							**23,081,691,700**							**23,081,691,700**
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
	1.2.05.01.1.2.05.15.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Peningkatan Kualitas Udara; Persentase Peningkatan Kualitas Air;**																
								PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			**Persentase peningkatan kualitas air**									
															PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		
																		Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur		
																		Persentase Tingkat Kehadiran ASN		
									Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		**Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**100 %**				**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase pemenuhan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja**		
	1.2.05.01.1.2.05.15.028.		Pengelolaan Data Informasi dan Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Jenis Dokumen	8 Jenis Dokumen	260,885,000				Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah dokumen/ laporan	11 Dokumen	260,885,000				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen	8 Jenis Dokumen	260,885,000
	1.2.05.01.0.0.00.01.	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**									
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur									

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	**KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))**	**PROGRAM (Diisi dari Renja PD)**	**KEGIATAN (Diisi dari Renja)**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU (Rp.)**	**KODEFIKASI**	**PROGRAM**	**KEGIATAN**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU (Rp.)**	**KODEFIKASI**	**PROGRAM**	**KEGIATAN**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU (Rp.)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	10	**11**	**12**	**13**	**14**	**18**	**19**	20	**21**	**22**	**23**	**24**
											Persentase Tingkat Kehadiran ASN									
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**								
																Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat**	**100%**	
	1.2.05.01.0.0.00.01.037.		Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100 Persen	350,000,000				Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Jaminan Barang Milik Daerah yang disediakan	1 OPD DLHK	350,000,000				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	100 Persen	350,000,000
																Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.0.0.00.01.007.		Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	54 Jenis	185,000,000				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	45 Jenis	185,000,000				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	41 Unit	485,000,000
	1.2.05.01.0.0.00.01.003.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	41 Unit	300,000,000				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapa kantor yang diadakan	44 Unit	300,000,000							
	1.2.05.01.0.0.00.01.008.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	12 Jenis	75,850,000				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	18 Jenis	75,850,000				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	12 Jenis	75,850,000
	1.2.05.01.0.0.00.01.009.		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	30,000,000				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	30,000,000				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	30,000,000
	1.2.05.01.0.0.00.01.010.		Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	10000 Porsi/ Box	274,998,000				Penyediaaan Makan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	10000 Porsi	274,998,000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	10000 Porsi/ Box	274,998,000

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
	1.2.05.01.0.0.00.01.011.		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	75 Kali	701,128,000				Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	111 Kali	701,128,000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	75 Kali	601,128,000
																Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.0.0.00.01.001.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Surat yang Dikirim	149 Surat	8,000,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	2000 Surat	8,000,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	149 Surat	8,000,000
	1.2.05.01.0.0.00.01.002.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	26 Rekening	1,200,000,000				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	26 Rekening	1,200,000,000				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	26 Rekening	1,200,000,000
	1.2.05.01.0.0.00.01.012.		Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	50 OB	1,173,162,428				Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	804 OB	1,675,512,428				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan	50 OB	2,360,980,928
	1.2.05.01.0.0.00.01.013.		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	17 OB	502,350,000														
	1.2.05.01.0.0.00.01.004.		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	685,468,500				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	685,468,500							
	1.2.05.01.0.0.00.02.016.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	291 Unit	150,000,000				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	400 Unit	150,000,000				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	291 Unit	150,000,000
	1.2.05.01.0.0.00.02.	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**																
																Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.0.0.00.02.013.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	8 Unit	85,000,000				Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan	22 Unit	85,000,000				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	10 Unit	185,000,000
	1.2.05.01.0.0.00.02.014.		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	10 Unit	100,000,000				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/ operasional yang dilakukan pemeliharaan	12 Unit	100,000,000							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																				

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
	1.2.05.01.1.2.05.15.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Peningkatan Kualitas Udara; Persentase Peningkatan Kualitas Air;**																
															PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
																Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		**Persentase kab/kota yang meningkat kebersihan dan keteduhannya**	**100%**	
	1.2.05.01.1.2.05.15.005.		Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	Frekuensi Event Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	2 Kali	250,000,000											Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Frekuensi Event Pameran Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Riau Expo	2 Kali	250,000,000
								PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			**Persentase peningkatan kualitas udara**				**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**Persentase peningkatan kualitas udara**		
									Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/		**Persentase kab/kota yang meningkat kebersihan dan keteduhannya**	**100%**				**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**		**Persentase kab/kota yang meningkat kebersihan dan keteduhannya**	**100%**	
	1.2.05.01.1.2.05.15.001.		Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Kab/Kota yang meningkat kebersihan dan keteduhannya	12 Kab/Kota	91,300,000				Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang meningkat kebersihan dan keteduhannya	12 Kab/Kota	341,300,000				Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang meningkat kebersihan dan keteduhannya	12 Kab/Kota	166,300,000
								PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			**Persentase peningkatan kualitas udara**				**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**			**Persentase peningkatan kualitas udara**		

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	**KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))**	**PROGRAM (Diisi dari Renja PD)**	**KEGIATAN (Diisi dari Renja)**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU (Rp.)**	**KODEFIKASI**	**PROGRAM**	**KEGIATAN**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU (Rp.)**	**KODEFIKASI**	**PROGRAM**	**KEGIATAN**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU (Rp.)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	10	**11**	**12**	**13**	**14**	**18**	**19**	20	**21**	**22**	**23**	**24**
									Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		**persentase Kab/Kota yang dibina tentang Pendidikan Lingkungan Hidup**	**100 %**				**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi**		**persentase Kab/Kota yang dibina tentang Pendidikan Lingkungan Hidup**	**100 %**	
	1.2.05.01.1.2.05.15.014.		Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup	Jumlah Kab/Kota yang dibina tentang Pendidikan Lingkungan Hidup	12 Kab/ Kota	150,000,000				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakata	Jumlah Kab/Kota yang dibina tentang Pendidikan Lingkungan Hidup	12 Kab/ Kota	75,000,000							
										Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga/ kelompok masyarakat yang dilakukan pendampingan	6 lembaga/ kelompok masyarakat	75,000,000				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Kab/Kota yang dibina tentang Pendidikan Lingkungan Hidup	12 Kab/ Kota	75,000,000
								PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			**Persentase peningkatan kualitas air**				**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**			**Persentase peningkatan kualitas air**		
									Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		**Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup**	**100 %**				**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**		**Persentase tindak lanjut pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup**	**100 %**	

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
	1.2.05.01.1.2.05.15.006.		Penataan dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup.	Jumlah Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup	50 Kasus	200,000,000				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diverifikasi	65 Kasus	200,000,000				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Kasus Pengaduan Lingkungan Hidup yang diverifikasi	50 Kasus	200,000,000
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			**Persentase peningkatan kualitas air**				**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**			**Persentase peningkatan kualitas air**		
									Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		**Persentase peningkatan kinerja KPA Kabupaten/Kota dan pengawas lingkungan di Provinsi Riau dan terlaksananya penaatan usaha/kegiatan di kabupaten/kota**	**100 %**				**Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**		**Persentase peningkatan kinerja KPA Kabupaten/Kota dan pengawas lingkungan di Provinsi Riau dan terlaksananya penaatan usaha/kegiatan di kabupaten/kota**	**100 %**	
	1.2.05.01.1.2.05.15.007.		Penilaian, Pembinaan dan Pengawasan AMDAL	Jumlah lokasi meningkatnya kinerja KPA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan terlaksana	12 Lokasi	150,000,000				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah lokasi meningkatnya kinerja KPA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan terlaksananya penaatan usaha/kegiatan di kabupaten/kota	12 Lokasi	150,000,000				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah lokasi meningkatnya kinerja KPA Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dan terlaksananya penataan usaha/kegiatan di kabupaten kota	12 Lokasi	150,000,000
	1.2.05.01.1.2.05.15.008.		Pengawasan Izin Lingkungan	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi izin lingkungannya	17 Usaha/ Kegiatan	149,962,000				Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas LH yang dilakukan pengembangan kapasitas	4 orang	20,000,000				Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas LH yang dilakukan pengembangan kapasitas	4 orang	20,000,000
										Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi izin lingkungannya	60 usaha/ kegiatan	99,962,000				Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi izin lingkungannya	17 Usaha/ Kegiatan	99,962,000
										Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi	12 Kab/Kota	30,000,000				Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi	9 Kab/Kota	30,000,000
								PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			**Persentase peningkatan kualitas air**				**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**			**Persentase peningkatan kualitas air**		
									Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		**persentase Kab/ Kota yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3**	**100 %**				**Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**		**persentase Kab/ Kota yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3**	**100 %**	

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
	1.2.05.01.1.2.05.15.010.		Pembinaan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah Kab/Kota yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3	12 Kab/ Kota	150,000,000				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Kab/ Kota yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3	12 Kab/ Kota	111,295,800				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Kab/ Kota yang terbina dalam penerbitan izin pengelolaan Limbah B3	12 Kab/ Kota	111,295,800
										Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Frekuensi koordinasi dan sinkronisasi ke pusat	3 kali	38,704,200				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	38,704,200
								PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			**Persentase peningkatan kualitas air**				**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**			**Persentase peningkatan kualitas air**		
									Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		**Persentase penyusunan dokumen perencanaan LH Provinsi Riau**	**100 %**				**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**		**Persentase penyusunan dokumen perencanaan LH Provinsi Riau**	**100 %**	
	1.2.05.01.1.2.05.15.015.		Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Riau	1 Dokumen	650,000,000				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	650,000,000				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH Provinsi Riau	1 Dokumen	650,000,000
	1.2.05.01.1.2.05.15.016.		Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Dokumen IKPLHD Provinsi Riau dan terselenggaranya penilaian	1 Dokumen	100,000,000				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen IKPLHD Provinsi Riau dan terselenggaranya penilaian Dokumen IKPLHD Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	100,000,000				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen IKPLHD Provinsi Riau dan terselenggaranya penilaian Dokumen IKPLHD Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau	1 Dokumen	100,000,000
									Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Prvinsi		**Persentase Kab/ Kota Asistensi dan Validasi KLHS KRP Kabupaten/Kot**	**100 %**				**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Prvinsi (KLHS) Provinsi**		**Persentase Kab/ Kota Asistensi dan Validasi KLHS KRP Kabupaten/Kota di Provinsi Riau**	**100 %**	
	1.2.05.01.1.2.05.15.009.		Asistensi KLHS Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota Asistensi dan Validasi KLHS KRP Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	12 Kab/ Kota	428,778,000				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Kab/ Kota Asistensi dan Validasi KLHS KRP Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	12 Kab/ Kota	428,778,000				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah asistensi validasi KLHS Kab/Kota	9 Kab/Kota	155,401,000
																	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah asistensi validasi KLHS Kab/Kota	12 Kab/ Kota	273,377,000
								PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN			**Persentase peningkatan kualitas air**				**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**			**Persentase peningkatan kualitas air**		

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	**KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))**	**PROGRAM (Diisi dari Renja PD)**	**KEGIATAN (Diisi dari Renja)**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU (Rp.)**	**KODEFIKASI**	**PROGRAM**	**KEGIATAN**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU (Rp.)**	**KODEFIKASI**	**PROGRAM**	**KEGIATAN**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU (Rp.)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	10	**11**	**12**	**13**	**14**	**18**	**19**	20	**21**	**22**	**23**	**24**
									Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		**Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**100 %**				**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**		**Persentase penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	**100 %**	
	1.2.05.01.1.2.05.15.020.		Pembinaan dan Pengembangan Program Kampung Iklim Provinsi Riau	Jumlah lokasi kampung iklim di Provinsi Riau yang dibina	5 Lokasi	125,000,000				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	Jumlah lokasi pengembangan kampung iklim	7 lokasi	275,000,000				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	275,000,000
	1.2.05.01.1.2.05.15.032.		Penyusunan Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	150,000,000														
	1.2.05.01.1.2.05.15.002.		Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Dokumen Pemantauan Kualitas Lingkungan	4 Dokumen	521,946,000				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara	Jumlah dokumen pemantauan kualitas lingkungan	4 Dokumen	1,271,946,000				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara	Jumlah Unit	4 Unit	1,121,946,000
	1.2.05.01.1.2.05.15.030.		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Hidup,	Jumlah Unit	4 Unit	600,000,000														
															PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					
																Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		**Persentase penanganan sampah di**		
	1.2.05.01.1.2.05.15.004.		Koordinasi Pengendalian Pencemaran Limbah Padat dan Domestik Provinsi Riau,	Jumlah Kab/Kota yang terhimpun data pengurangan danpenanganan sampah terkait Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi Riau	12 Kab/ Kota	150,000,000											Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah Kab/Kota yang terhimpun data pengurangan danpenanganan sampah terkait Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Provinsi Riau	12 Kab/ Kota	150,000,000
								PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			**Persentase peningkatan kualitas air**									
									Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		**Persentase penanganan sampah di TPA/TPST di Provinsi Riau**	**100 %**								

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
	1.2.05.01.1.2.05.15.017.		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Unit Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	12 Unit	200,000,000				Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Unit Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	24 Unit	100,000,000				Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Unit Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	12 Unit	100,000,000
										Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Jumlah Kab/kota yang dilakukan koordinasi dan sikronisasi	12 Kab/kota	50,000,000				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50,000,000
										Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Kab/kota yang dilakukan kerjasama penanganan sampah	12 Kab/kota	50,000,000				Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	50,000,000
								PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			**Persentase peningkatan kualitas air**				**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**			**Persentase peningkatan kualitas air**		
									Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		**Persentase Kab/Kota yang dapat pembinaan kearifan lokal**	**100 %**				**Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**		**Persentase Kab/Kota yang dapat pembinaan kearifan lokal**	**100 %**	
	1.2.05.01.1.2.05.15.018.		Pengembangan Kearifan Lokal	Jumlah Kab/Kota yang dapat pembinaan kearifan lokal (penghargaan lingkungan hidup)	5 Kab/ Kota	180,000,000				Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Kab/Kota yang dapat pembinaan kerifan lokal	7 Kab/ Kota	180,000,000				Koordinasi, sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Kab/Kota yang dapat pembinaan kearifan lokal (penghargaan lingkungan hidup)	5 Kab/ Kota	180,000,000
								PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			**Persentase lokasi keanekaragaman hayati di Provinsi Riau**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**Persentase lokasi keanekaragaman hayati di Provinsi Riau**		
									Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		**Persentase lokasi pengembangan keanekaragaman hayati di Provinsi Riau**	**100 %**				**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi**		**Persentase lokasi pengembangan keanekaragaman hayati di Provinsi Riau**	**100 %**	
	1.2.05.01.1.2.05.15.019.		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Jumlah Lokasi Keanekaragaman Hayati di Areal Izin Usaha/ Kegiatan	10 Lokasi	109,698,000				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati di Provinsi Riau	1 Dokumen	10,000,000				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati di Provinsi Riau	1 Dokumen	10,000,000

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
										Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	jumlah Taman Keanekaragaman Hayati/ekowisata di Luar Kawasan Hutan	1 Lokasi	30,000,000				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	30,000,000
										Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah lokasi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1 lokasi	10,000,000				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	10,000,000
										Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	1 lokasi	15,000,000				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15,000,000
										Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumla Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	1 lokasi	15,000,000				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	15,000,000
										Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	1 lokasi	29,698,000				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	29,698,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		**Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ perhutanan Sosial**	**100 %**				**Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan**		**Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ perhutanan Sosial**	**100 %**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.004.		Penyuluhan dan Pengawasan Perlindungan Hutan pada Hutan Adat/HKm/Desa	Jumlah Lokasi Penyuluhan dan Pengawasan perlindungan hutan pada hutan	4 Lokasi	185,000,000				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah lokasi / kelompok tani hutan/ masyarakat yang dilakukan pendampingan	3 lokasi	185,000,000				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Lokasi Penyuluhan dan Pengawasan perlindungan hutan pada hutan adat/ Hkm/Desa	4 Lokasi	185,000,000
	1.2.05.01.2.0.04.16.003.		Asistensi Pengendalian Pelaksanaan RKU, RKT dan RPHD pada Perizinan	Jumlah izin dalam tertibnya pelaksanaan PS yang berorientasi	20 Izin	242,800,000				Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Izin/Kelompok masyarakat /perusahaan	20 izin/pokmas	512,196,000				Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah izin dalam tertibnya pelaksanaan PS yang berorientasi masyarakat	20 Izin	242,800,000
															PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
																Pemanfaatan Hutan di Kawasan hutan Produksi dan Hutan Lindung		**persentase dokumen PNBP sektor kehutanan dan penanganan, Pengukuran, dan Pengujian hasil hutan**	**100 %**	

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
	1.2.05.01.2.0.04.16.009.		Pengembangan Perhutanan Sosial di Provinsi Riau	Jumlah Laporan	13 Laporan	269,396,000											Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah laporan	13 laporan	269,396,000
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**									
									Pemanfaatan Hutan di Kawasan hutan Produksi dan Hutan Lindung		**persentase dokumen PNBP sektor kehutanan dan penanganan, Pengukuran, dan Pengujian hasil hutan**	**100 %**								
	1.2.05.01.2.0.04.16.011.		Optimalisasi PNBP (Peningkatan Penerimaan Negara) Sektor Kehutanan	Jumlah dokumen Rekonsiliasi PNBP Sektor kehutanan	1 Dokumen	275,000,000				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen PNBP sektor kehutanan dan penanganan, Pengukuran, dan Pengujian hasil hutan	1 Dokumen	395,000,000				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen Rekonsiliasi PNBP Sektor kehutanan	1 Dokumen	395,000,000
	1.2.05.01.2.0.04.16.010		Penanganan, Pengukuran, dan Pengujian Perambahan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan Ilegal	Jumlah Laporan	23 Laporan	120,000,000														
																Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				
	1.2.05.01.2.0.04.16.033.		Identifikasi Dan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Luas Hutan Yang Teridentifikasi Dan Terselesaikan Dari Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	150 Ha	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen /sistim informasi kehutanan	1 Dokumen/ Sistim	250,000,000				Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Luas Hutan Yang Teridentifikasi Dan Terselesaikan Dari Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	150 Ha	250,000,000
									Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		**Persentase dokumen Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**100 %**				**Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)**		**Persentase dokumen Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan**	**100 %**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.035.		Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah Pengelolaan KPH	Jumlah Dokumen Perencanaan KPH	1 Dokumen	113,129,900				Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	113,129,900				Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Perencanaan KPH	1 Dokumen	113,129,900
																Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				
																	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Unit Hutan Hak/Rakyat	10 Unit	100,000,000

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
	1.2.05.01.2.0.04.17.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**		**Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis**																
									Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan		**persentase izin/wilayah kerja**	**100 %**				**Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi**		**persentase perkara /kasus tindak pidana kehutanan yang**	**100 %**	
	1.2.05.01.2.0.04.17.005.		Penanganan dan penyelesaian perkara/ kasus tindak pidana kehutanan	Jumlah perkara /kasus tindak pidana kehutanan yang terselesaikan	2 Kasus	300,000,000				Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Frekuensi Perlindungan dan Pengamanan Hutan	12 Kali	500,000,000				Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	Jumlah perkara /kasus tindak pidana kehutanan yang terselesaikan	2 Kasus	500,000,000
	1.2.05.01.2.0.04.17.010.		Perlindungan dan Pengamanan	Frekuensi Perlindungan dan	13 Kali	200,000,000														
									Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		**Persentase unit pembangunan/ pengelolaan Hutan Rakyat**	**100 %**								
	1.2.05.01.2.0.04.17.007.		Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	Jumlah Kab/Kota dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	12 Kab/ Kota	265,000,000				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan koordinasi	12 Kab/ Kota	265,000,000				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan	Jumlah Kab/Kota dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau	12 Kab/ Kota	265,000,000
								PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			**Persentase penurunan luasan lahan kritis**				**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**			**Persentase penurunan luasan lahan kritis**		
									Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kab/Kota		**Persentase luas rehabilitasi DAS**	**100 %**				**Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi**		**Persentase luas rehabilitasi DAS**	**100 %**	
	1.2.05.01.2.0.04.17.008.		Rehabilitasi Mangrove Provinsi Riau	Jumlah Lahan Mangrove Yang Direhab	16 Ha	299,260,000				Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Luas rehabiltasi DAS	20 Ha	781,700,000				Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Lahan Mangrove Yang Direhab	16 Ha	299,260,000
	1.2.05.01.2.0.04.17.044.		Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Riau	Jumlah Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	10 Ha	350,000,000											Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen	1 Dokumen	125,000,000
	1.2.05.01.2.0.04.17.002.		Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam Provinsi Riau	Jumlah Lokasi Aksi Serentak Menanam Pohon dan Penghijauan dan Konservasi Alam Provinsi Riau	1 Lokasi	132,440,000									**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
	1.2.05.01.2.0.04.17.004.		Pengembangan data dan Informasi Daerah Aliran Sungai	Jumlah dokumen Groundcheck kondisi penutupan	1 Dokumen	125,000,000				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen	1 Dokumen	125,000,000			**Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara**		**Persentase Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan**		
																	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Luasan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	10 Ha	482,440,000
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	**KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))**	**PROGRAM (Diisi dari Renja PD)**	**KEGIATAN (Diisi dari Renja)**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU (Rp.)**	**KODEFIKASI**	**PROGRAM**	**KEGIATAN**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU (Rp.)**	**KODEFIKASI**	**PROGRAM**	**KEGIATAN**	**SUB KEGIATAN**	**INDIKATOR**	**TARGET**	**PAGU (Rp.)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	10	**11**	**12**	**13**	**14**	**18**	**19**	20	**21**	**22**	**23**	**24**
	1.2.05.01.1.2.05.15.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**		**Persentase Peningkatan Kualitas Udara; Persentase Peningkatan Kualitas Air;**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur							**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**		
											Persentase Tingkat Kehadiran ASN							**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**		
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.1.2.05.15.027.		Peningkatan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT, Laboratorium	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksana	12 Bulan	150,187,520				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	150 Surat	3,000,000				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	37 Unit	24,042,000
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapa kantor yang diadakan	1 Unit	5,000,000				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	4 Jenis	5,000,000
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	7,500,000				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	3,000,000
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	5,000,000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	96 Porsi/ Box	5,000,000
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	32 Jenis	10,000,000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Kali	7,290,000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	5 Jenis	5,000,000			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	3,000,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	150 surat	1,400,000
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	104 Porsi	5,000,000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	24 OB	36,455,520
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	13 Kali	7,290,000				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	42 Unit	13,000,000
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	24 OB	71,897,520			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
										Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	8 Unit	7,500,000				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Unit	55,000,000
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	12,000,000							
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	2,000,000							
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	3,000,000							
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah meubeleur yang dipelihara	20 Unit	3,000,000							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																				
								PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			**Persentase lokasi keanekaragaman hayati di Provinsi Riau**				**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**			**Persentase lokasi keanekaragaman hayati di Provinsi Riau**		
									Pengelolaan Keanekaragaman hayati Provinsi		**Persentase lokasi pengembangan keanekaragaman hayati di Provinsi Riau**	**100%**								
	1.2.05.01.1.2.05.15.013.		Pengembangan Sarana dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan	Jumlah unit sarana dan prasarana yang memadai di UPT Laboratorium Lingkungan	90 Unit	1,000,000,000				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan Prasarana UPT. Laboratorium Lingkungan	90 Unit	1,000,000,000				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah unit sarana dan prasarana yang memadai di UPT Laboratorium Lingkungan	90 Unit	1,000,000,000
UPT PELATIHAN KEHUTANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 185,155,520**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur					**185,155,520**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**		
											Persentase Tingkat					**185,155,520**		**Persentase Tingkat**		
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.013.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT pelatihan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksana	12 Bulan	185,155,520				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	60 Surat	1,000,000			-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Unit	41,254,520

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapa kantor yang diadakan	4 Unit	23,000,000				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	3,000,000
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	44,147,000				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	1,000,000
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	3,500,000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	250 Porsi/ Box	3,539,000
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	30 Jenis	15,880,000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Kali	20,822,000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	6 Jenis	2,312,000			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	735,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	60 surat	1,300,000
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	107 Porsi	4,080,000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	2 OB	78,240,000
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Kali	22,596,000				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	16 Unit	8,000,000
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	24 OB	34,955,520			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	28,950,000				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 Unit	28,000,000
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1,000,000							
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	3,000,000							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**				**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		**Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan/ perhutanan Sosial**	**100%**								

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
	1.2.05.01.2.0.04.16.029.		Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Kelompok Masyarakat Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Kelompok Tani	2 Kelompok Tani	150,000,000				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok tani	2 Kelompok Tani	300,000,000				Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok tani	2 Kelompok Tani	300,000,000
	1.2.05.01.2.0.04.16.030.		Kemitraan Kewirausahaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	150,000,000														
UPT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 185,607,824**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur					**185,607,824**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**		
											Persentase Tingkat Kehadiran ASN					**Rp 185,607,824**		**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**		
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.014.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT perbenihan tanaman hutan	12 Bulan	185,607,824				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	60 Surat	800,000			-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	26 Unit	6,552,379
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	43,240,000				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	3,498,512
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	2,407,020				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	1,794,109
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	26 Jenis	6,552,379				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	100 Porsi/ Box	2,400,000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	3,610,530				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6 Kali	28,492,824
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	1,000,000			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	100 Porsi	2,400,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	60 surat	960,000

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Kali	28,954,440				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	3 OB	97,440,000
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	36 OB	55,807,824				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	4 Unit	2,440,000
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	40,835,631			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Unit	42,030,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Perbenihan Tanaman Hutan		**persentase pemenuhan kebutuhan bibit untuk penghijauan**	**100%**				**Perbenihan Tanaman Hutan**		**persentase pemenuhan kebutuhan bibit untuk penghijauan**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.028.		Pengembangan Perbenihan	Jumlah Bibit	70000 Batang	500,000,000				Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit yang dibuat	55.311 Bibit	876,000,000				Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Bibit	55.311 Bibit	876,000,000
	1.2.05.01.2.0.04.17.	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN**		**Persentase Penurunan Luasan Lahan Kritis**																
	1.2.05.01.2.0.04.17.043.		Penyediaan Sumber Daya Genetik	Jumlah Jenis Genetik	5 Jenis	376,000,000														
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MODEL MINAS TAHURA																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 504,420,656**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur					**504,420,656**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**		
											Persentase Tingkat Kehadiran ASN					**Rp 504,420,656**		**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**		
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
	1.2.05.01.2.0.04.16.012.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas Tahura	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPHP Minas tahura	12 Bulan	504,420,656				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	60 Surat	1,203,510			-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17 Unit	13,835,000
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapa kantor yang diadakan	12 Unit	7,000,000				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	3 Jenis	221,000
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	260,856,576				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	1,950,000
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	5,750,000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	120 Porsi/ Box	1,792,000
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	6 Jenis	6,876,490				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	2 Kali	8,545,000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	221,000			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	50,772,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	50 surat	1,150,000
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	0 Porsi	1,200,000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	16 OB	360,978,816
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	4 Kali	17,090,000				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	2 Unit	14,000,000
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	48 OB	108,652,080				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	36,000,000
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	44,799,000			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	9 Unit	65,948,840
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY			**Persentase pengelolaan Tahura di Provinsi Riau**				**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**			**Persentase pengelolaan Tahura di Provinsi Riau**		

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
									Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		**Persentase Pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan sarana prasarana**	**100%**				**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi**		**Persentase Pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan sarana prasarana wisata tahura**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.007.		Pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	300,000,000				Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Pengembangan dan pemeliharaan pengelolaan	1 Lokasi	300,000,000				Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Lokasi	1 Lokasi	300,000,000
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPHP Minas Tahura**	**100%**				**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPHP Minas Tahura**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.036.		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPHP Minas Tahura	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BAGAN SIAPI-API																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 250,419,904**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**			
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur					**Rp 250,419,904**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**			
											Persentase Tingkat Kehadiran ASN					**Rp 250,419,904**		**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**		
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.025.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnva UPT	Rentang waktu peningkatan manajemen dan	12 Bulan	250,419,904				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	110 Surat	1,500,000			Rp -	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Unit	29,298,000
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapa kantor yang diadakan	2 Unit	23,264,000				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	1,000,000
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	21,834,048				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	1,200,000
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	1,800,000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	21 Porsi/ Box	1,000,000

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	10 Jenis	6,034,000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	110,862,000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	1,000,000			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	1,200,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	150 surat	1,500,000
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	21 Porsi	1,000,000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	36 OB	94,139,904
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	110,862,000				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	8 Unit	1,800,000
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	36 OB	72,305,856			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	9,620,000				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Unit	9,620,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bagan Siapi-api**	**100%**				**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bagan Siapi-api**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.038.		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bagan Siapi-Api	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	200,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BENGKALIS PULAU																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 250,940,896**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur					**250,940,896**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**		

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
											Persentase Tingkat Kehadiran ASN					**Rp 250,940,896**		**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**		
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.015.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Bengkalis Pulau	12 Bulan	250,940,896				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	110 Surat	1,500,000			-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	33 Unit	1,300,000
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapa kantor yang diadakan	3 Unit	29,455,595				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	10 Jenis	6,395,000
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	45,694,694				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	12,000,000
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	1,300,000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	200 Porsi/ Box	4,800,000
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	25 Jenis	4,077,745				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	54,181,634
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	4 Jenis	6,395,000			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	12,000,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	150 surat	1,500,000
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	200 Porsi	4,800,000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	36 OB	127,634,092
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	54,181,634				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	4 Unit	29,455,595
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	36 OB	81,939,398			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	8 Unit	3,596,830				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Unit	13,674,575
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	6,000,000							

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bengkalis Pulau**	**100%**				**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bengkalis Pulau**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.039.		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Bengkalis Pulau	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MANDAU																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 201,078,272**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**			
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana					**201,078,272**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana**			
											Persentase Tingkat Kehadiran ASN					**Rp 201,078,272**		**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**			
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.016.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandau	12 Bulan	201,078,272				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	60 Surat	1,198,000			-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21 Unit	59,480,456
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapa kantor yang diadakan	2 Unit	11,950,000				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	8 Jenis	6,253,544
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	21,234,048				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	85 porsi	4,000,000
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	3 unit	2,600,000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	7 kali	48,588,000
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	25 Jenis	8,971,600			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	8 Jenis	5,723,400				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	60 surat	1,198,000

RKPD /RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	12 Bulan	54,000,000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	24 OB	57,718,272
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	85 Porsi	4,000,000				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Unit	16,500,000
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	7 Kali	47,367,000			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100%	
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	24 OB	36,484,224				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Unit	7,340,000
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	4,950,000							
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	2,600,000							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandau**	**100%**				**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandau**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.040.		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandau	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	200,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) ROKAN																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 200,558,576**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana					**200,558,576**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana**		
											Persentase Tingkat Kehadiran ASN					**Rp 200,558,576**		**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**		

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.017.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Rokan	12 Bulan	200,558,576				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	60 Surat	1,500,000			-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	22 Unit	22,646,984
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapa kantor yang diadakan	3 Unit	9,900,000				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	5,115,000
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	23,112,096				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	990,000
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	5,400,000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	200 Porsi/ Box	4,500,000
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	33 Jenis	11,427,000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Kali	69,200,000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	5,115,000			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	990,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	60 Surat	1,500,000
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	200 Porsi	4,500,000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	3 OB	60,806,592
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Kali	73,524,000				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	15 Unit	5,400,000
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	24 OB	39,690,480			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	25,400,000				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 Unit	30,400,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
									Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Rokan**	**100%**				**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Rokan**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.041.		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Rokan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan	Jumlah dokumen	1 Dokumen	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SULIGI BATU GAJAH																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 203,260,304**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana					**203,260,304**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana**		
											Persentase Tingkat					**Rp 203,260,304**		**Persentase Tingkat**		
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.026.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Suligi Batu Gajah	12 Bulan	203,260,304				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	60 Surat	1,203,510			-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Unit	8,896,490
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	65,107,984				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	1,459,000
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	3,400,000				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	130,000
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	4 Jenis	8,896,490				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	140 Porsi/ Box	2,310,000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	1,459,000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Kali	17,100,000
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	130,000			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	140 Porsi	2,310,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	60 surat	1,203,510
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Kali	17,100,000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	36 OB	140,720,304

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	36 OB	75,612,320				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5 Unit	3,400,000
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	28,041,000			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Unit	28,041,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Suligi Batu Gajah**	**100%**				**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Suligi Batu Gajah**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.042.		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Suligi - Batu Gajah	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KAMPAR KIRI																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 201,630,368**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana					**201,630,368**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana**		
											Persentase Tingkat Kehadiran ASN					**Rp 201,630,368**		**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**		
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.018.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Kampar Kiri	12 Bulan	201,630,368				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	60 Surat	1,000,000			-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 Unit	17,744,000

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	22,114,048				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	10 Jenis	500,000
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	2,000,000				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	3,590,112
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	18 Jenis	17,744,000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	180 Porsi/ Box	3,600,000
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	180 Porsi	3,600,000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Kali	60,265,888
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Kali	48,656,000			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	36 OB	73,516,320				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	60 surat	1,000,000
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	33,000,000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	36 OB	95,630,368
																	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	3 Unit	2,000,000
																Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Unit	17,300,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Kampar Kiri**	**100%**				**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Kampar Kiri**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.043.		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Kampar Kiri	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SOREK																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Pengguna an Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 201,001,808**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**			
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur					**201,001,808**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**			
											Persentase Tingkat Kehadiran ASN					**Rp 201,001,808**		**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**			
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.019.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Sorek	12 Bulan	201,001,808				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	60 Surat	1,500,000			-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Unit	7,208,088
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	27,214,048				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	8 Jenis	4,695,000
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	9,100,000				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	1,000,000
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	19 Jenis	8,208,000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	120 Porsi/ Box	8,100,000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	4,695,000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	76,354,720
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	360 Porsi	8,100,000			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Kali	82,198,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	100 surat	1,500,000
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	24 OB	44,087,760				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	4 OB	79,145,000
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	15,899,000				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	15 Unit	9,100,000
																Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 Unit	13,899,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Sorek**	**100%**				**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Sorek**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.044.		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Sorek	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	200,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TASIK BESAR SERKAP																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 552,462,400**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**			
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur					**552,462,400**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**			
											Persentase Tingkat Kehadiran ASN					**Rp 552,462,400**		**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**			
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.024.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tasik Besar Serkap	12 Bulan	552,462,400				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	60 Surat	1,000,000			0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 Unit	14,820,000
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapa kantor yang diadakan	5 Unit	19,350,000				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	1,440,000
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	52,437,664				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	2,400,000

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	7,500,000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	107 Porsi/ Box	900,000
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	25 Jenis	5,470,000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	1 Kali	191,640,000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	2 Jenis	1,440,000			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	2,400,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	60 surat	1,000,000
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	107 Porsi	900,000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	96 OB	249,522,400
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	5 Kali	181,640,000				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	13 Unit	25,940,000
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	96 OB	197,084,736			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Pengadaan Mebeleur	Jumlah meubeleur yang diadakan	0 Unit	-				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1 Unit	64,800,000
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	64,800,000							
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	13,440,000							
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	5,000,000							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Tasik Besar Sekap**	**100%**				**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Tasik Besar Sekap**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.037.		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Model Tasik Besar Serkap	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) TEBING TINGGI																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Pengguna an Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran** **Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana** **Persentase Tingkat Kehadiran ASN**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 276,796,256** **276,796,256** **Rp 276,796,256**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran** **Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana** **Persentase Tingkat Kehadiran ASN**		
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	
	1.2.05.01.2.0.04.16.020.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Tebing tinggi	12 Bulan	276,796,256				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	110 Surat	1,000,000			-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Unit	9,153,638
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	49,023,596				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	8 Jenis	4,490,797
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	7,000,000				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	2,145,000
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	18 Jenis	9,158,000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	120 Porsi/ Box	1,792,000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	4 Jenis	4,491,000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	91,658,351
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	2,145,500			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	120 Porsi	1,800,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	100 surat	999,000
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	92,210,000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	5 OB	124,669,600
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	36 OB	83,968,160				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	15 Unit	6,980,000
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	26,000,000			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 Unit	34,907,870
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Tebing Tinggi**	**100%**				**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Tebing Tinggi**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.045.		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Tebing Tinggi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MANDAH																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran** **Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur** **Persentase Tingkat Kehadiran ASN**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 275,271,728** **275,271,728** **Rp 275,271,728**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran** **Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur** **Persentase Tingkat Kehadiran ASN**		
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	
	1.2.05.01.2.0.04.16.021.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Mandah	12 Bulan	275,271,728				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	110 Surat	1,000,000			-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	21 Unit	64,912,000
										Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	6 Unit	53,000,000				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	8 Jenis	3,193,200
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	23,299,848				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	850,000

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	3,000,000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	90 porsi	2,700,000
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	29 Jenis	7,721,000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	8 kali	113,400,000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	4 Jenis	3,193,200			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	8,050,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	100 surat	999,000
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	120 Porsi	2,700,000				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	12 OB	52,657,528
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	111,700,000				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	12 Bulan	3,000,000
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	12 OB	29,357,680			**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	32,250,000				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	1Unit	33,560,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandah**	**100%**				**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandah**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.046.		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Mandah	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	250,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	250,000,000
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) INDRAGIRI																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 200,419,904**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**		

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur					**200,419,904**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**		
											Persentase Tingkat Kehadiran ASN					**Rp 200,419,904**		**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**		
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.022.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Indragiri	12 Bulan	200,419,904				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	110 Surat	1,000,000			-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis	1,265,000
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	22,231,496				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 Unit	7,016,854
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	6,600,000				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	8 Jenis	6,749,794
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	13 Jenis	5,826,200				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	170 Porsi	3,840,000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	4 Jenis	6,750,000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	95,406,000
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	10,440,000			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	160 Porsi	3,840,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	100 Surat	998,000
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	86,402,000							
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	24 OB	35,711,808				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	24 OB	56,945,856
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	21,618,400				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	10 unit	6,580,000
																Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	2 Unit	21,618,400
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Indragiri**	**100%**				**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Indragiri**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.047.		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Indragiri	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	200,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000
UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SINGINGI																				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																				
	1.2.05.01.2.0.04.16.	**PROGRAM PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN**		**Luasan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan**																
								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Rp 200,927,936**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran**			
											Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur					**200,927,936**		**Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur**			
											Persentase Tingkat Kehadiran ASN					**Rp 200,927,936**		**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**			
									Administrasi Umum		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum**	**100%**				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100%	
	1.2.05.01.2.0.04.16.023.		Peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya UPT KPH Singingi	Rentang waktu peningkatan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada UPT KPH Singingi	12 Bulan	200,927,936				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	110 Surat	1,632,000			-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Unit	6,510,616
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	42,354,048				Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	8 Jenis	1,000,000

RKPD/RENJA PD TAHUN 2021							PMDN 90/2019							PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019						
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN	KODEFIKASI (Diisi dari i-Planning))	PROGRAM (Diisi dari Renja PD)	KEGIATAN (Diisi dari Renja)	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)	KODEFIKASI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	18	19	20	21	22	23	24
										Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 Bulan	2,500,000				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	1,000,000
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	12 Jenis	5,808,000				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	120 Porsi/ Box	4,050,000
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	4 Jenis	555,000				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	89,975,000
										Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	196 Porsi	4,050,000			**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
										Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 Kali	89,975,000				Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	100 surat	1,632,000
										Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan yang Disediakan	24 OB	43,053,888				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	5 OB	83,260,320
										Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah mobil dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan	1 Unit	11,000,000				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	15 Unit	2,500,000
																Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	3 Unit	11,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																				
								PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**				**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**			**Luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan**		
									Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Singingi**	**100%**				**Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung**		**Persentase Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Singingi**	**100%**	
	1.2.05.01.2.0.04.16.048.		Pengembangan Potensi di Wilayah Kerja UPT KPH Singingi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	200,000,000				Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Unit Wilayah Kerja	1 Unit Wilayah Kerja	200,000,000
JUMLAH						**23,081,691,700**				**JUMLAH**			**23,081,691,700**					**JUMLAH**		**23,081,691,700**